



**PERANAN STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN PERKREDITAN
TERHADAP PENGAMANAN PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA
PADA BANK JABAR CABANG RANGKASBITUNG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.

Diajukan oleh :

LENI SUPARLAENI
Nrp : 022197238
Nirm : 41043403970605

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR
2001**

**PERANAN STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN PERKREDITAN
TERHADAP PENGAMANAN PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA
PADA BANK JABAR CABANG RANGKASBITUNG**

SKRIPSI

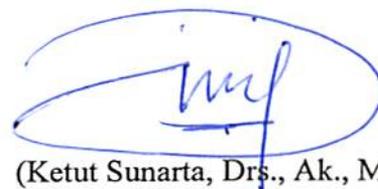
Diajukan sebagai salah satu syarat
dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor

Menyetujui :

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Jurusan,


(Eddy Mulyadi S, Drs., Ak., MM.)


(Ketut Sunarta, Drs., Ak., MM.)



**PERANAN STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN PERKREDITAN
TERHADAP PENGAMANAN PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA
PADA BANK JABAR CABANG RANGKASBITUNG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor

Menyetujui :

Dosen Penguji,



(Fazariah Mahruzar, Dra., Ak., MM.)

Pembimbing,



1. (Nandang Muchtar, Drs., Ak.)

Co. Pembimbing,



2. (Ferdisar Andrian, SE.,MM.)

Ucap satu kata " tantangan "
Pada angin yang kencang, ketika perahu terguncang

Ucap satu kata " kepastian "
Pada bimbang yang mengembang, ketika cita di persimpangan

Tapi jangan ucap kata " kekalahan "
Jika perjuangan belum selesai
Selama hidup belum usai

Skripsi ini kupersembahkan untuk:
Orangtuaku, kakakku dan seseorang yang kusayangi

ABSTRAK

Dalam peranannya sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit maka sebagian besar volume usaha bank adalah terfokus pada kegiatan pemberian kredit, sehingga sumber pendapatan bank mayoritas berasal dari kegiatan penyaluran kredit. Kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur merupakan kekayaan bank yang harus benar-benar dijamin mengenai pengembaliannya pada jangka waktu yang telah ditentukan.

Bank berkepentingan atas dana yang disalurkan dalam bentuk kredit kepada debitur, karena dana tersebut merupakan kekayaan bank yang memiliki resiko tinggi mengalami kerugian. Oleh karena itulah, maka dibutuhkan suatu struktur pengendalian intern perkreditan. Dengan melihat bahwa perkreditan merupakan kegiatan utama pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul : **“ Peranan Struktur Pengendalian Intern Perkreditan Terhadap Pengamanan Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung “**. Dengan bertitik tolak pada hal tersebut, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit modal kerja yang dilakukan oleh Bank Jabar Cabang Rangkasbitung ?
- 2) Bagaimana peranan struktur pengendalian intern perkreditan terhadap pengamanan pemberian kredit modal kerja pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung ?

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas melalui beberapa

buku yang ada sebagai landasan teori dari suatu kenyataan yang ada. Selain itu, digunakan pula metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung dari objek penelitian.

Penulis melakukan penelitian pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung yang berlokasi di jalan Patih Derus No. 04 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Adapun penulis melakukan penelitian yaitu pada tanggal 25 Juli sampai dengan 29 September 2001.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengendalian intern perkreditan pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung telah cukup memadai, karena dalam prosedur pemberian kredit cukup relatif sederhana dan jelas sehingga terlihat bahwa dalam setiap prosedur pemberian kredit telah terdapat pemisahan fungsi yang cukup jelas, yaitu adanya pemisahan fungsi pada bagian otorisasi, bagian pelaksanaan, bagian pencatatan dan bagian pengawasan. Dengan demikian memudahkan pihak bank dalam mengamankan kredit karena tertutupnya kemungkinan petugas bank untuk menangani kegiatan pemberian kredit dari awal sampai akhir. Jadi apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan pemberian kredit maka tindakan koreksi menjadi lebih mudah untuk diidentifikasi, sehingga keamanan terhadap kredit menjadi lebih terjamin.

Peranan pengendalian intern perkreditan sangat penting bagi bank untuk menjamin keamanan kekayaan bank yang disalurkan dalam bentuk kredit. Mengingat kredit merupakan kekayaan yang memiliki resiko tinggi terhadap kerugian maka dibutuhkan struktur pengendalian intern perkreditan yang baik agar kegiatan pemberian kredit dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan pengendalian intern yang baik sehingga mempengaruhi terhadap pengamanan penggunaan kredit. Maka dari itu dengan

terwujudnya pengamanan pada pemberian kredit maka kelangsungan hidup bank akan memberikan jaminan yang memadai.

Dari uraian diatas maka jelaslah bahwa untuk memberikan jaminan yang memadai terhadap kegiatan pemberian kredit maka sebaiknya pihak bank sedini mungkin sering melakukan peninjauan dan pemeriksaan secara mendadak terhadap kegiatan usaha debitur dengan tujuan untuk memastikan bahwa kredit yang telah diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan rencana, sehingga terjadinya kredit macet dapat diantisipasi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor. Adapun judul skripsi ini adalah “ **Peranan Struktur Pengendalian Intern Perkreditan Terhadap Pengamanan Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung** “.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

- 1) Bapak Eddy Mulyadi S., Drs., Ak., MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
- 2) Bapak Ketut Sunarta, Drs., Ak., MM., selaku Ketua Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.
- 3) Bapak Nandang Muchtar, Drs., Ak., selaku Pembimbing Utama dalam penyusunan skripsi ini.
- 4) Bapak Ferdisar Andrian, SE., MM., selaku Koordinator Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
- 5) Pimpinan dan seluruh Staf karyawan Bank Jabar Cabang Rangkasbitung yang telah menyediakan waktunya dalam proses pelaksanaan pengumpulan data guna penyusunan skripsi ini.
- 6) Segenap Staf Pengajar dan Staf Tata Usaha Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.

- 7) Orangtua, kakak serta keluarga yang telah mendorong dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- 8) Teman-teman yang telah memberikan segenap bantuannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
- 9) Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari seluruh pembaca yang berguna untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca maupun bagi pihak lain yang membutuhkan.

Bogor, Oktober 2001

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.3. Kegunaan Penelitian	5
1.4. Kerangka Pemikiran	6
1.5. Metodologi Penelitian.....	9
1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	9
1.7. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Sistem Informasi Akuntansi.....	13
2.1.1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi.....	13
2.1.2. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi	14
2.1.3. Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi.....	16
2.2. Struktur Pengendalian Intern	18
2.2.1. Pengertian Stuktur Pengendalian Intern Perkreditan	19
2.2.2. Tujuan Struktur Pengendalian Intern Perkreditan.....	20
2.2.3. Unsur-unsur Yang Membangun Pengendalian Intern Perkreditan	21
2.3. Kredit Modal Kerja.....	23
2.3.1. Pengertian Kredit Modal Kerja	23
2.3.2. Tujuan dan Fungsi Kredit Modal Kerja	24
2.3.3. Jenis-Jenis Kredit Modal Kerja.....	26
2.3.4. Aspek-Aspek Penilaian Pemberian Kredit Modal Kerja.....	27
2.3.5. Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja.....	29
2.3.6. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kredit Modal Kerja.	31
2.4. Peranan Pengendalian Intern Perkreditan Terhadap Pengamanan Pemberian Kredit Modal Kerja	33
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	36
3.1. Objek Penelitian.....	36
3.1.1. Tinjauan Umum Perusahaan	36
3.1.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan	36
3.1.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	39
3.1.2. Tinjauan Khusus Perusahaan	45
3.1.2.1. Aktivitas Perusahaan	45
3.2. Metode Penelitian	48

3.2.1. Ruang Lingkup Penelitian	48
3.2.2. Sumber Data	48
3.2.3. Jenis Data	48
3.2.4. Alat dan Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.2.5. Teknik Penganalisaan Data.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1. Struktur Pengendalian Intern Perkreditan Pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung	50
4.1.1. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit Pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung	50
4.1.2. Sistem Pencatatan Perkreditan Pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung.....	67
4.1.3. Sistem Pelaporan Perkreditan Pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung.....	69
4.2. Peranan Struktur Pengendalian Intern Perkreditan Terhadap Pengamanan Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung	71
4.2.1. Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung	72
4.2.2. Peranan Struktur Pengendalian Intern Perkreditan Terhadap Pengamanan Pemberian Kredit Modal Kerja.....	76
BAB V RANGKUMAN KESELURUHAN.....	78
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	84
6.1. Simpulan	84
6.1.1. Simpulan Umum	84
6.1.2. Simpulan Khusus.....	85
6.2. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi Bank Jabar Cabang Rangkasbitung

Lampiran 2 Flow chart Pemberian Kredit Bank Jabar Cabang Rangkasbitung

Lampiran 3 Flow chart Penagihan Kredit Bank Jabar Cabang Rangkasbitung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia keuangan dewasa ini, khususnya lembaga keuangan semakin membaik. Secara kuantitatif hal ini terlihat dari semakin menjamurnya jumlah pendirian lembaga keuangan, kemudian secara kualitatif pengetahuan masyarakat tentang peranan lembaga keuangan sekarang ini juga semakin meningkat. Masyarakat semakin kritis dan pandai dalam menilai dan memilih lembaga keuangan sebagai tempat untuk memperoleh modal usaha.

Bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional, baik sebagai penghimpun dana, penyalur dana, maupun sebagai pemberi jasa. Bagi Bank, permasalahan perkreditan merupakan masalah utama dalam peranannya sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan hampir dari sebagian besar volume usaha Bank adalah berupa kredit, sehingga sumber pendapatan Bank mayoritas berasal dari kegiatan pemberian kredit.

Bank Jabar Cabang Rangkasbitung memberikan kredit jangka pendek, kredit jangka menengah dan jangka panjang kepada perusahaan-perusahaan dalam segala tingkatannya yaitu kecil, menengah dan besar. Pemberian kredit ditujukan kepada perusahaan-perusahaan untuk keperluan pengembangan, rehabilitasi, dan modernisasi seperti kredit modal kerja umum, kredit modal kerja

permanen, kredit investasi umum, kredit investasi kecil dan kredit kepemilikan rumah. Bank Jabar Cabang Rangkasbitung membatasi pemberian kredit modal kerja dan kredit investasi sampai dengan Rp. 100 juta rupiah kepada para nasabahnya, tetapi bila dana atas permintaan kredit di Cabang tidak mencukupi maka pihak bank akan mengajukannya ke kantor Pusat. Oleh karena itu, dengan adanya berbagai jenis kredit yang diberikan, maka Bank harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Pentingnya peranan Bank dalam pergerakan ekonomi, mengharuskan kinerja perbankan yang sehat dan efisien. Dalam hal ini perlu adanya manajemen yang baik dan didukung oleh personil yang baik pula. Selain itu diperlukan adanya kebijakan dan prosedur-prosedur yang menggambarkan adanya pengendalian intern yang memadai, sehingga kredit yang diberikan oleh Bank dapat tersalurkan sebagaimana mestinya.

Struktur pengendalian intern terhadap perkreditan sangat penting bagi Bank. Pengendalian intern tersebut ditujukan untuk menilai sejauhmana para pejabat kredit Bank mampu menggunakan prinsip klasik kredit yang disebut dengan prinsip 5 C di dalam memberikan kredit modal kerja. Prinsip 5 C merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menilai calon debitur, apakah layak atau tidak untuk diberikan kredit dan meminimalisasikan kredit-kredit yang kurang baik. Adapun prinsip-prinsip kredit tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Character* (watak/kepribadian)
2. *Capacity* (kemampuan)

3. *Capital* (modal)

4. *Collateral* (jaminan)

5. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).

Maksud penilaian terhadap kredit itu adalah pertama-tama untuk meletakkan kepercayaan dan kedua untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bila kredit ternyata jadi diberikan. Penerapan penilaian kredit tersebut untuk menghindari terjadinya kerugian bagi pihak Bank, apabila calon debitur di kemudian hari kemungkinan mengalami hal-hal sebagai berikut :

- Kegagalan usaha calon debitur
- Kemacetan total kreditnya

Dalam penulisan ini pembahasan dikhususkan terhadap pemberian kredit modal kerja, karena bagi setiap perusahaan modal merupakan faktor terpenting untuk mengembangkan usaha dan menampung resiko kerugian. Adapun yang dimaksud dengan kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan oleh Bank kepada perusahaan-perusahaan untuk menambah modal suatu usaha. Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif yaitu jumlah hasil, maupun peningkatan kualitatif yaitu penungkatan kualitas/mutu hasil produksi. Jadi kredit yang diberikan ini sifatnya produktif atau menghasilkan.

Kegiatan usaha Bank Jabar Cabang Rangkasbitung antara lain :

- Menghimpun dana masyarakat

- Memberi kredit jangka pendek, menengah dan panjang untuk keperluan modal kerja dan investasi.

Dengan memperhatikan akan pentingnya fungsi pengendalian intern bagi suatu badan usaha , serta dengan melihat bahwa masalah perkreditan merupakan masalah utama dalam kegiatan Bank Jabar Cabang Rangkasbitung, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul : “ **Peranan Struktur Pengendalian Intern Perkreditan Terhadap Pengamanan Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung** “. Dengan bertitik tolak pada hal tersebut, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit modal kerja yang dilakukan oleh Bank Jabar Cabang Rangkasbitung ?
- 2) Bagaimana peranan struktur pengendalian intern perkreditan terhadap pengamanan pemberian kredit modal kerja pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung ?

1.2. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang akan digunakan sebagai bahan kajian di dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi, dan merupakan salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit modal kerja yang dilakukan oleh Bank Jabar Cabang Rangkasbitung.
- 2) Untuk mengetahui peranan struktur pengendalian intern perkreditan terhadap pengamanan pemberian kredit modal kerja pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung.

1.3. Kegunaan Penelitian

Setelah penulis melaksanakan, menyusun, dan menyelesaikan penelitian dalam bentuk karya tulis ini, penulis berharap agar karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung .

Penulisan yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :

1) Bagi Penulis

Mendapatkan suatu pengalaman serta dapat membandingkan sejauhmana teori-teori yang didapat di bangku kuliah dengan praktek yang ada di perusahaan.

2) Bagi Perusahaan

Penulis ingin memberikan sumbangan pemikiran kepada perusahaan atau sebagai bahan masukan yang mungkin akan bermanfaat bagi perusahaan.

3) Bagi Pembaca

Dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan khasanah bacaan.

1.4. Kerangka Pemikiran

Dewasa ini pengetahuan masyarakat tentang peranan lembaga keuangan semakin meningkat. Masyarakat semakin kritis dan pandai dalam menilai dan memilih lembaga keuangan sebagai tempat untuk memperoleh modal usaha. Oleh karena itu, Bank harus mampu meningkatkan pelayanannya khususnya terhadap kegiatan pokok perbankan yaitu menerima dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk, kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam berbagai bentuk perkreditan.

Sejalan dengan luasnya variasi jenis-jenis kegiatan usaha yang ada di dalam sistem perekonomian di masyarakat ternyata membawa pengaruh kepada variasi dari jenis-jenis kredit yang disediakan oleh perbankan antara lain kredit modal kerja, kredit konsumtif dan kredit investasi. Dalam memberikan kreditnya, Bank akan memperoleh keuntungan dari para debitur yaitu berupa bunga kredit.

Pada setiap pemberian kredit sebelumnya dilakukan analisis kredit yang pada prinsipnya dimaksudkan untuk menilai kelayakan permohonan kredit yang diajukan kepada Bank. Menurut **Dahlan Siamat** dalam bukunya yang berjudul **Manajemen Bank Umum** memberikan rumusan tentang kriteria yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit yaitu :

- 1) ***Safety***, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali sesuai jadwal dan jangka waktu kredit.
- 2) ***Efectiveness***, yaitu kredit yang diberikan tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan sasaran pembiayaan sebagaimana dicantumkan dalam proposal kredit.

(7 : 211)

Di dalam pemberian suatu kredit khususnya kredit modal kerja, tidak semua kredit modal kerja yang diberikan akan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Keamanan kredit harus menjadi pertimbangan utama manajer Bank dalam memberikan kredit, karena pada umumnya pemberian kredit jauh lebih mudah daripada penarikan kembali kredit tersebut. Pengalaman membuktikan orang mudah meminjam, tapi sulit untuk mengembalikan pinjaman.

Untuk mengurangi masalah-masalah yang dapat mengakibatkan adanya kegagalan kredit dan terjadinya kerugian maka dibutuhkan suatu struktur pengendalian intern. Struktur pengendalian perusahaan terdiri dari kebijakan dan prosedur-prosedur untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan perusahaan dapat dicapai.

Mengingat kredit merupakan kekayaan perusahaan yang beresiko tinggi mengalami kerugian maka untuk memberikan rasa aman terhadap kegiatan pemberian kredit dibutuhkan unsur-unsur yang dapat menunjang pengendalian intern perkreditan tersebut. **Bambang Hartadi** dalam bukunya **Sistem Pengendalian Intern** mengemukakan pendapatnya tentang adanya empat ciri utama yang dapat menunjang terlaksananya pengendalian intern yang memadai yaitu :

- 1) **Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat.**
- 2) **Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang cukup memungkinkan guna pengawasan akuntansi terhadap aktiva, hutang, pendapatan dan biaya.**

- 3) Adanya praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap bagian dalam organisasi.
- 4) Tingkat kecakapan pegawai sesuai dengan tanggung jawabnya. (4 : 57)

Pengendalian intern dalam perkreditan harus diterapkan pada semua tahapan proses perkreditan mulai sejak permohonan kredit sampai pelunasan atau penyelesaian kredit.

Adapun menurut Thomas Suyatno dalam bukunya **Dasar-dasar Perkreditan** menjelaskan bahwa Pengendalian intern di bidang perkreditan sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan pengawasan ganda pada setiap proses pemberian kredit yang mengandung kerawanan terhadap penyalahgunaan atau yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Bank.
- 2) Melakukan perlindungan fisik yang memadai terhadap surat berharga dan kekayaan Bank yang terkait dengan perkreditan harus memadai.
- 3) Menciptakan mekanisme bahwa setiap pelanggaran terhadap kebijakan perkreditan Bank dan prosedur pelaksanaan kredit dapat segera diketahui atau dilaporkan kepada Direksi atau pejabat yang berwenang. (19 :200)

Dalam melaksanakan pemberian kreditnya Bank memerlukan suatu struktur pengendalian intern yang memadai, karena di dalam pemberian kredit mempunyai resiko yaitu adanya kredit macet atau penyalahgunaan wewenang. Pengendalian dilakukan untuk mengurangi terjadinya kerugian.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka penulis mengemukakan suatu hipotesa : **Dengan Diterapkannya Struktur Pengendalian Intern Yang Memadai Pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung Dapat Mengamankan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja.**

1.5. Metodologi Penelitian

Data dan informasi yang dibutuhkan guna melengkapi dan melatarbelakangi karya tulis ini didapat melalui :

1) Riset kepustakaan (*Library Research*).

Riset kepustakaan yaitu mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas melalui kepustakaan baik dengan membaca, mempelajari, dan memahami.

2) Riset Lapangan (*Field Research*).

Riset lapangan yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung dari objek penelitian. Adapun data yang dipergunakan dalam bentuk:

- (a) Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung pada objek yang diteliti.
- (b) Interview yaitu pengumpulan data dengan cara tehnik wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah-masalah dalam penulisan karya tulis ini.

1.6. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan makalah ini, penulis mengadakan riset langsung pada objek penelitian yaitu Bank Jawa Barat Cabang Rangkasbitung yang beralamat di jalan Patih Derus No. 04 Rangkasbitung , Kabupaten Lebak. Adapun penulis melakukan penelitian pada tanggal 25 Juli sampai dengan 29 September 2001.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan makalah ini dirancang sedemikian rupa oleh penulis agar para pembaca lebih memahami dan mengerti arus pembahasan yang diuraikan dalam makalah ini. Adapun sistematika pembahasan tersebut mencakup :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan titik tolak bagi pembahasan bab-bab selanjutnya yang menguraikan pokok pembahasan antara lain : latar belakang penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, lokasi dan waktu penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan mengenai teori-teori yang mendukung dan dijadikan dasar dalam pembahasan yaitu : pengertian sistem informasi akuntansi, tujuan sistem informasi akuntansi, unsur-unsur sistem informasi akuntansi, pengertian struktur pengendalian intern perkreditan, tujuan struktur pengendalian intern perkreditan, unsur-unsur yang membangun pengendalian intern perkreditan, pengertian kredit modal kerja, tujuan dan fungsi kredit modal kerja, jenis-jenis kredit modal kerja, aspek-aspek penilaian kredit modal kerja, prosedur pemberian kredit modal kerja, sistem pencatatan dan pelaporan kredit modal kerja serta peranan

pengendalian intern perkreditan terhadap pengamanan pemberian kredit modal kerja.

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tinjauan umum perusahaan mengenai sejarah singkat Bank Jabar Cabang Rangkasbitung, struktur organisasi dan uraian tugas, tinjauan khusus perusahaan mengenai aktivitas perusahaan, serta metode penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai struktur pengendalian intern perkreditan pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung, prosedur pelaksanaan pemberian kredit pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung, sistem pencatatan perkreditan, sistem pelaporan perkreditan pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung, peranan struktur pengendalian intern perkreditan terhadap pengamanan pemberian kredit modal kerja pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung, pelaksanaan pemberian kredit modal kerja pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung, dan peranan pengendalian intern perkreditan terhadap pengamanan pemberian kredit modal kerja.

BAB V RANGKUMAN KESELURUHAN

Dalam bab ini menguraikan tentang rangkuman keseluruhan dari BAB I sampai BAB IV.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan simpulan umum maupun simpulan khusus serta saran–saran yang dapat diberikan kepada perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi sejumlah literatur yang dijadikan referensi dalam kepentingan penelitian.

LAMPIRAN

Berisi tambahan informasi yang digunakan untuk melengkapi pembuatan makalah ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Informasi Akuntansi

Suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya memerlukan suatu sistem informasi akuntansi. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi, mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi ekonomik mengenai suatu badan usaha. Informasi adalah data yang berguna yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar-dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Sistem adalah kumpulan sumber daya yang berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis menjelaskan pengertian dari sistem informasi akuntansi.

2.1.1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Steven A. Moscovice dalam bukunya *Accounting Information System* yang dialihbahasakan oleh Zaki Baridwan dalam bukunya *Sistem Informasi Akuntansi* mengenai pengertian dari sistem informasi akuntansi yaitu :

Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan kepada pihak di luar perusahaan (seperti kantor pajak, investor, dan kreditor) dan pihak intern perusahaan (terutama manajemen). (20 : 3)

Sedangkan George H Bodnar dan William S. Hopwood dalam bukunya *Accounting Information Systems* menjelaskan pengertian dari sistem informasi akuntansi yaitu :

An Accounting Information System is a collection of resources, such as people and equipment, designed to transform financial and other data into information. This information is communicated to a wide variety of decision makers. (6 : 1)

Definisi tersebut diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf dan Rudi

M. Tambunan dalam bukunya **Sistem Informasi Akuntansi** adalah sebagai berikut :

Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada beragam pengambil keputusan. (6 : 1)

Berdasarkan pada definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya dan suatu komponen organisasi yang diubah menjadi suatu informasi yang berguna untuk dasar pengambilan keputusan bagi pihak ekstern dan pihak intern perusahaan.

2.1.2. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi yang baik diharapkan bermanfaat untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Adapun tujuan dari sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi dalam bukunya **Sistem Akuntansi** adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru.
- 2) Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur organisasinya.
- 3) Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.
- 4) Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. (16 : 19)

Sedangkan tujuan dari sistem informasi akuntansi menurut

M. Samsul dan Mustofa dalam bukunya **Sistem Akuntansi**

Pendekatan Manajerial adalah sebagai berikut :

- 1) Menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkat manajemen pemilik atau pemegang saham secara tepat dan cepat
- 2) Menyediakan informasi yang diperlukan oleh pihak luar perusahaan
- 3) Menyempurnakan kontrol melalui organisasi, prosedur-prosedur dan cara-cara lain untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan
- 4) Mengurangi biaya penyelenggaraan administratif ke tingkat yang lebih rendah dari nilai manfaatnya. (13:56)

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi bertujuan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan kegiatan usaha perusahaan, dengan adanya sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan kontrol terhadap pengamanan harta kekayaan perusahaan.

2.1.3. Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi

Terciptanya data informasi akuntansi bersumber dari data transaksi keuangan. Data keuangan yang kemudian menjadi data akuntansi yang bersumber dari dalam maupun luar perusahaan setelah diolah melalui pengolahan transaksi menghasilkan informasi akuntansi.

Mulyadi dalam bukunya **Sistem Akuntansi** menjelaskan mengenai unsur-unsur dari sistem informasi akuntansi terdiri dari :

- 1) **Formulir**
- 2) **Jurnal**
- 3) **Buku besar**
- 4) **Buku Pembantu**
- 5) **Laporan** (16 : 3-5)

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai unsur-unsur dari sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut :

1) **Formulir**

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen yang didokumentasikan diatas secarik kertas.

2) **Jurnal**

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Seperti telah disebutkan diatas, sumber informasi

pencatatan dalam jurnal ini adalah formulir. Dalam jurnal ini data keuangan untuk pertama kalinya diklasifikasikan menurut penggolongannya sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

3) Buku Besar

Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur yang akan disajikan dalam laporan keuangan

4) Buku Pembantu

Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan rinciannya lebih lanjut dapat dibantu dalam buku pembantu atau subsidiary ledger. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar.

5) Laporan

Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan rugi /laba, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan harga pokok penjualan, dan daftar umur piutang. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem informasi akuntansi.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sistem informasi akuntansi satu sama lain saling berkaitan. Dengan adanya unsur-unsur sistem informasi akuntansi yang baik maka informasi yang akan dihasilkan merupakan informasi yang dapat diandalkan sehingga berguna bagi manajemen dalam menghasilkan suatu keputusan yang tepat bagi perusahaan.

2.2. Struktur Pengendalian Intern Perkreditan

Dalam peranannya sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit maka sebagian besar volume usaha bank adalah terfokus pada kegiatan pemberian kredit, sehingga sumber pendapatan bank mayoritas berasal dari kegiatan penyaluran kredit. Kredit yang diberikan oleh bank pada debitur merupakan kekayaan bank yang harus benar-benar dijamin mengenai pengembaliannya pada jangka waktu yang telah ditentukan

Bank berkepentingan atas dana yang disalurkanannya dalam bentuk kredit kepada debitur, karena dana tersebut berasal dari nasabah yang menyimpannya di bank. Oleh karena itu, mengingat pentingnya kredit bagi suatu bank maka dituntut adanya jaminan keamanan yang memadai atas kredit yang telah diberikan. Dan untuk memberikan jaminan keamanan yang memadai terhadap kredit yang telah diberikan maka diperlukan suatu struktur pengendalian intern perkreditan. Berikut ini penulis menjelaskan pengertian dari struktur pengendalian intern perkreditan

2.2.1. Pengertian Struktur Pengendalian Intern Perkreditan

Dalam rangka pengamanan terhadap kredit, bank melakukan pengawasan yang seksama atas perjalanan kredit yaitu baik secara keseluruhan maupun secara individual per nasabah atau debitur, apakah pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan rencana yang disusun atau tidak. **Teguh Pudjo Muljono** dalam bukunya **Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil** menjelaskan mengenai pengertian dari pengawasan perkreditan yang merupakan salah satu alat pengendalian intern yaitu :

Pengawasan perkreditan adalah salah satu fungsi manajemen dalam usaha untuk pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien guna menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta penyusunan administratif perkreditan yang benar. (18 : 462)

Pengawasan kredit secara efektif sangat menentukan lancar tidaknya perkreditan pada suatu bank. Pengawasan tidak hanya semata-mata dilakukan terhadap kredit yang diberikan, tetapi harus berjalan semenjak permohonan kredit sampai pada pelunasan kredit. Menurut **Muchdarsyah Sinungan** dalam bukunya **Manajemen Dana Bank** pelaksanaan pengawasan kredit dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1) Pengawasan aktif

Pengawasan dilakukan di tempat usaha debitur, sehingga secara langsung dapat diketahui segala masalah yang timbul.

2) Pengawasan pasif

Pengawasan dilakukan melalui penelitian terhadap laporan tertulis debitur, seperti laporan keadaan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan rugi laba, laporan penyaluran keuangan (dari mutasi rekening pinjaman), laporan aktivitas (dari perkembangan usaha debitur). (14 : 269)

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kualitas dari debitur dapat terbentuk apabila pengawasan kredit dilakukan secara efektif oleh bank. Dengan terbentuknya kualitas debitur maka terjadinya resiko kerugian terhadap kredit seperti kegagalan usaha debitur, terjadinya kredit macet akan dapat diantisipasi.

2.2.2. Tujuan Struktur Pengendalian Intern Perkreditan

Tujuan yang ingin dicapai dari struktur pengendalian intern perkreditan adalah sejalan dengan batasan dari pengertian pengawasan perkreditan. Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dari struktur pengendalian intern perkreditan menurut Teguh Pudjo Muljono dalam bukunya **Manajemen Perkreditan** adalah sebagai berikut :

- 1) Agar penjagaan atau pengawasan dalam pengelolaan kekayaan bank di bidang perkreditan dapat dilakukan dengan lebih baik untuk menghindarkan penyelewengan-penyelewengan baik dari oknum ekstern bank maupun intern bank.**
- 2) Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi di bidang perkreditan serta penyusunan dokumentasi perkreditan yang lebih baik.**
- 3) Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan dan tatalaksana usaha di bidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang ada.**
- 4) Untuk memajukan agar kebijaksanaan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas manual perkreditan,**

- 4) Untuk memajukan agar kebijaksanaan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas manual perkreditan, surat-surat edaran dan dapat dipatuhi serta dilaksanakan dengan baik. (18 : 463)**

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setiap tujuan dari tujuan struktur pengendalian intern perkreditan satu sama lain saling berkaitan. Misalnya dalam administrasi kredit yang dilaksanakan dengan benar dan teliti maka akan membantu menemukan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi. Begitu juga dengan adanya sistem dokumentasi yang baik terhadap arsip-arsip perkreditan akan meningkatkan efisiensi dari pelaksanaan perkreditan.

2.2.3. Unsur-Unsur Yang Membangun Pengendalian Intern Perkreditan

Untuk mencapai tujuan pengendalian intern perkreditan maka dibutuhkan unsur-unsur yang dapat membangun pengendalian intern. Pengendalian intern perkreditan memiliki unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur ini saling berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pengendalian intern perusahaan. Alvin A. Arens dan James K. Loebbecke dalam bukunya *Auditing An Integrated Approach* yang diterjemahkan oleh Ilham Tjakra Kusuma dalam bukunya *Auditing Suatu Pendekatan Terpadu* mengemukakan mengenai unsur-unsur yang dapat membangun pengendalian intern yaitu :

- 1) Pegawai yang kompeten dan dapat dipercaya dengan otoritas dan tanggung jawab yang jelas.**
- 2) Pemisahan tugas yang jelas**

- 3) Adanya prosedur-prosedur otorisasi yang wajar
- 4) Dokumen dan catatan-catatan yang memadai
- 5) Pengendalian fisik atas harta dan catatan-catatan perusahaan
- 6) Internal check secara independen terhadap pencapaian hasil kerja (2 : 373)

Sedangkan menurut La Midjan dan Azhar Susanto dalam bukunya **Sistem Informasi Akuntansi** menjelaskan bahwa ada beberapa unsur yang dapat menunjang terlaksananya pengendalian intern yang memadai yaitu :

- 1) Adanya struktur organisasi yang menggambarkan pemisahan fungsi (*segregation of function*) dan pekerjaan yang tepat.
- 2) Sistem pemberian wewenang dan prosedur pencatatan
- 3) Unsur pelaksanaan yang wajar (praktek yang sehat)
- 4) Adanya suatu bagian pengawasan intern (*Internal Auditing*) (11 : 38)

Pemberian kredit yang diberikan oleh Bank tidak terlepas dari adanya unsur-unsur yang dapat membangun pengendalian intern perkreditan. Pengendalian intern dalam perkreditan harus diterapkan pada semua tahapan proses pemberian kredit yaitu mulai sejak permohonan kredit sampai pada pelunasan kredit. Thomas Suyatno dalam bukunya **Dasar-Dasar Perkreditan** menjelaskan bahwa struktur pengendalian intern perkreditan sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1) Prinsip pengawasan ganda harus diterapkan pada setiap tahap proses pemberian kredit yang mengandung kerawanan terhadap penyalahgunaan dan atau yang dapat menimbulkan kerugian keuangan bank.
- 2) Perlindungan pisik terhadap surat berharga dan kekayaan bank yang terkait dengan perkreditan harus memadai

- 3) Adanya mekanisme bahwa setiap pelanggaran terhadap kebijaksanaan perkreditan bank dan prosedur pelaksanaan kredit dapat segera diketahui atau dilaporkan kepada direksi atau pejabat yang berwenang. (19 : 200)

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa setiap bank harus mempunyai unsur- unsur yang dapat membangun pengendalian intern perkreditan . Maksud dari pengendalian intern perkreditan adalah untuk menjamin bahwa dalam pelaksanaan perkreditan dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dari berbagai pihak yang dapat merugikan bank dan menghindari terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat.

2.3. Kredit Modal Kerja

Secara umum pengertian kredit adalah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk meningkatkan usahanya. Adapun kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu "*credere*" yang berarti kepercayaan. Kepercayaan yang dimaksud dalam perkreditan yaitu antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Dalam penulisan ini pembahasan dikhususkan terhadap pemberian kredit modal kerja. Berikut ini penulis menjelaskan pengertian dari kredit modal kerja.

2.3.1. Pengertian Kredit Modal Kerja

Malayu S.P. Hasibuan dalam bukunya *Manajemen Perbankan* mengemukakan mengenai pengertian kredit modal kerja yaitu :” Kredit modal kerja atau kredit perdagangan yaitu kredit untuk menambah

modal suatu usaha atau perusahaan. Jadi kredit ini sifatnya produktif atau menghasilkan “. (12 : 9)

Definisi mengenai kredit modal kerja menurut Gatot Supramono dalam bukunya **Perbankan dan Masalah Kredit** adalah sebagai berikut: “Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah. Jadi kredit ini sasarannya untuk membiayai biaya operasi nasabah “. (8 : 46)

Sedangkan pengertian kredit modal kerja menurut H. Hadiwidjaja dan R.A. Rivai Wirasasmita dalam bukunya **Analisis Kredit** adalah sebagai berikut :” Kredit modal kerja adalah kredit yang dipergunakan untuk membiayai modal lancar, yang biasa habis dalam satu atau beberapa proses produksi ”. (9 : 39)

Berdasarkan pada uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan oleh bank untuk kepentingan modal kerja debiturnya. Pada dasarnya kredit modal kerja bersifat produktif yaitu dipergunakan untuk membiayai biaya operasi nasabah, contohnya adalah dipergunakan untuk membeli bahan dasar, alat-alat bantu maupun membayar biaya lainnya.

2.3.2 Tujuan dan Fungsi Kredit Modal Kerja

Tujuan dari pemberian fasilitas kredit ini secara garis besar ditujukan untuk kegiatan konsumtif dan kegiatan produktif. Untuk kegiatan produktif

bank memberikan fasilitas kredit dalam bentuk kredit modal kerja. Adapun tujuan dari pemberian kredit yang dilakukan oleh suatu bank menurut Kasmir dalam bukunya **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya** adalah sebagai berikut :

1) Mencari keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2) Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk memebantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak bank akan dapat mengembangkan da memperluas usahanya.

3) Membantu Pemerintah

Bagi Pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. (10 : 95-96)

Kemudian di samping tujuan di atas suatu fasilitas kredit juga mempunyai suatu fungsi yaitu antara lain :

- 1) Untuk meningkatkan daya guna uang**
- 2) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang**
- 3) Untuk meningkatkan daya guna barang**
- 4) Meningkatkan peredaran uang**
- 5) Sebagai alat stabilitas ekonomi**
- 6) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha**
- 7) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan**
- 8) Untuk meningkatkan hubungan internasional (10 :97-99)**

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dan fungsi dari pemberian kredit khususnya kredit modal kerja adalah bertujuan untuk meningkatkan daya guna modal dalam memenuhi kebutuhan dana usaha masyarakat. Selain itu juga kredit dapat dijadikan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

2.3.3. Jenis-Jenis Kredit Modal Kerja

Suatu badan usaha membutuhkan dana atau modal untuk membiayai kegiatan usahanya. Modal kerja merupakan aktiva lancar yang diperlukan oleh perusahaan dalam menyelenggarakan aktivitasnya sehari-hari. **Bambang Riyanto** dalam bukunya **Dasar-Dasar Pembelian Perusahan** menjelaskan mengenai jenis-jenis kredit modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan yaitu terdiri dari :

1) Modal Kerja Permanen

Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya atau dengan kata lain modal kerja yang terus diperlukan untuk kelancaran usahanya. Modal kerja permanen dibagi dua yaitu :

- (a) Modal kerja primer yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya.**
- (b) Modal kerja normal yaitu modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal.**

2) Modal Kerja Variabel

Modal kerja variabel yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai perubahan keadaan. Modal kerja variabel terbagi tiga yaitu :

- (a) Modal kerja musim yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah- ubah disebabkan karena fluktuasi musim**

- (b) **Modal kerja siklis yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konyungtur.**
- (c) **Modal kerja darurat yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya, misalnya adanya kebakaran, gempa bumi, dan lain-lain. (5:54-55)**

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kredit modal kerja permanen merupakan kredit yang harus tetap ada pada perusahaan agar perusahaan dapat menjalankan fungsinya sedangkan kredit modal kerja variabel merupakan kredit modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan.

2.3.4. Aspek – Aspek Penilaian Pemberian Kredit Modal Kerja

Dalam kegiatan pemberian kredit mengandung suatu tingkat resiko (*degree of risk*) tertentu. Untuk menghindari maupun untuk memperkecil resiko kredit yang mungkin terjadi, maka permohonan kredit harus dinilai oleh bank atas dasar syarat-syarat tertentu yaitu yang terkenal dengan prinsip 5 C yang terdiri dari *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *conditions of economy*.

Di samping formula 5 C tersebut, di dalam pemberian kredit bank akan memperhatikan aspek-aspek pertimbangan kredit untuk menilai kelayakan usaha debitur. S. Munawir dalam bukunya **Analisa Laporan Keuangan** mengemukakan mengenai aspek-aspek pertimbangan di dalam penilaian pemberian kredit modal kerja yaitu terdiri dari :

- 1) **Aspek Umum, dalam hal ini yang harus diteliti adalah :**
 - (a) **Bentuk, nama dan alamat perusahaan**

- (b) Susunan manajemen
 - (c) Bidang usaha
 - (d) Keterangan tentang jumlah pegawai
 - (e) Kebangsaan
 - (f) Bank langganan
 - (g) Struktur organisasi
- 2) Aspek Ekonomi, yaitu mencakup :
- (a) Pemasaran dan keadaan harga
 - (b) Jumlah penjualan
 - (c) Cara penjualan
 - (d) Taksiran permintaan
 - (e) Persaingan
- 3) Aspek Teknik, hal-hal yang harus diteliti adalah :
- (a) Bahan baku dan penolong yang dibutuhkan
 - (b) Tanah dan tempat pabrik
 - (c) Bangunan (milik, sewa, dan harga)
 - (d) Proses produksi
 - (e) Jumlah produksi
 - (f) Tersedianya tenaga kerja (keahlian, pendidikan, tingkat upah)
 - (g) Dan lain-lain ✓
- 4) Aspek Yuridis, yaitu terdiri dari :
Memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk ijin-ijin yang diperlukan.
- 5) Aspek Kemanfaatan dan Kesempatan Kerja, adalah terdiri dari :
- (a) Manfaat ekonomi bagi penduduk dan pengaruhnya terhadap struktur perekonomian penduduk setempat.
 - (b) Jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh proyek yang bersangkutan
 - (c) Termasuk sektor yang diprioritaskan oleh Pemerintah
- 6) Aspek Keuangan
Aspek terakhir yang harus dianalisis merupakan aspek yang paling penting yaitu aspek keuangan. Dengan melakukan penilaian terhadap aspek keuangan maka akan diketahui likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan rentabilitas serta stabilitas usaha, selain itu juga dapat diketahui berapa lama suatu investasi akan dapat dikembalikan. Dalam hubungannya dengan penilaian aspek keuangan suatu permohonan kredit, hal-hal yang perlu dinilai adalah :
- 1) Neraca dan Laporan Laba Rugi
 - 2) Laporan sumber dan penggunaan modal kerja
 - 3) Rencana penerimaan dan pengeluaran kas (*Cash Budget*)
 - 4) Proyeksi laporan keuangan
 - 5) Penilaian proyek investasi

6) Perhitungan kebutuhan kredit

7) Rencana angsuran kredit

(17 : 235-237)

2.3.5. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit *Modal Kerja*

Salah satu alat yang digunakan dalam menilai calon debitur apakah layak atau tidak untuk diberikan kredit adalah dengan menggunakan prinsip klasik kredit yang disebut dengan prinsip 5 C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan conditions of economy*. Penilaian permohonan kredit atau yang disebut analisis kredit merupakan salah satu prosedur dari pelaksanaan pemberian kredit. Astiko dan Sunardi dalam bukunya **Pengantar Manajemen Perkreditan** mengemukakan mengenai proses pemberian kredit yang benar dan sehat adalah sebagai berikut :

1) Permohonan Kredit

Pengertian dari permohonan kredit adalah :

- (1) Permohonan baru untuk mendapatkan suatu jenis fasilitas kredit
- (2) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan
- (3) Permohonan perpanjangan/pembaharuan masa laku kredit yang berakhir jangka waktunya
- (4) Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan antara lain penukaran jaminan, perubahan atau pengunduran jadwal angsuran, dan sebagainya.

2) Penyelidikan dan Analisis Kredit

Dalam proses analisis kredit bank menggunakan prinsip 5 C yaitu untuk menilai kelayakan usaha debitur. Adapun pengertian dan ketentuan yang harus dilakukan dalam kegiatan analisis kredit yaitu :

- (1) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur
- (2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern maupun data ekstern.

- (3) Pemeriksaan atau penyediaan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya.
 - (4) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.
- 3) **Keputusan atas permohonan kredit**
Keputusan atas permohonan kredit adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui, atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi.
 - 4) **Penolakan Permohonan Kredit**
Penolakan permohonan dapat dilakukan oleh bagian kredit. Penolakan ini adalah untuk permohonan kredit yang nyata-nyata secara teknis dianggap tidak memenuhi syarat.
 - 5) **Persetujuan Permohonan Kredit**
Maksud dari persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur
 - 6) **Pencairan Fasilitas Kredit**
Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam praktek pencairan kredit berupa pembayaran dan atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya.
 - 7) **Pelunasan Fasilitas Kredit**
Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban hutang nasabah bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. (3 : 61-70)

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa di dalam memberikan suatu kredit harus melalui prosedur yang telah ditetapkan, supaya kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana yang ada pada surat permohonan kredit. Prosedur pemberian kredit tersebut harus dilaksanakan dengan baik untuk membantu bank di dalam mengamankan kredit. Selain itu, dengan prosedur yang baik memudahkan dalam menemukan terjadinya penyimpangan.

2.3.6. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kredit Modal Kerja

Teguh Pudjo Muljono dalam bukunya **Manajemen Perkreditan** bagi **Bank Komersil** menjelaskan bahwa proses pencatatan terhadap transaksi di bidang perkreditan dapat dikelompokan sebagai berikut :

- 1) **Pencatatan pembayaran kewajiban-kewajiban yang harus dilunasi oleh debitur yaitu :**
 - (1) **Biaya administrasi, baik pada saat pembukaan rekening debitur atau biaya administrasi rutin pada saat kredit berjalan.**
 - (2) **Pembayaran provisi kredit atau *commitment fee* pada saat nasabah memperoleh kredit baru atau perpanjangan kredit.**
 - (3) **Untuk pembayaran bunga kredit yang menjadi kewajibannya.**
- 2) **Pencatatan mutasi atau transaksi kredit, selama fasilitas kredit tersebut berjalan, yaitu :**
 - (1) **Pada waktu pelaksanaan penarikan/pembukaan kredit bank secara :**
 - **Tunai**
 - **Pemindahbukuan**
 - ***Clearing***
 - (2) **Pada waktu nasabah melaksanakan penyetoran-penyetoran terhadap rekeningnya, yang dapat pula dilakukan secara :**
 - **Tunai**
 - **Pemindahbukuan**
 - ***Clearing***
 - 3) **Pencatatan mutasi atau transaksi kredit pada saat pelunasan kredit.**
 - 4) **Pencatatan mutasi atau transaksi kredit pada saat penghapusan sebagai debitur. (18 : 366)**

Kegiatan pencatatan perkreditan tersebut harus dilaksanakan dengan baik. Semua kegiatan yang dimulai dari biaya administrasi pembukaan rekening, pembayaran provisi kredit, saat nasabah memperoleh kredit baru atau perpanjangan kredit dan pembayaran bunga kredit merupakan

bagian dari kegiatan pencatatan perkreditan. Kegiatan tersebut adalah salah satu langkah dalam mengamankan kredit yang telah diberikan oleh bank.

Setelah melakukan kegiatan pencatatan perkreditan maka dibutuhkan suatu laporan perkreditan. Untuk mengetahui bagaimana keadaan nasabah secara aktif, maka bank harus mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk menyusun laporan perkreditan. Data-data tentang kegiatan nasabah tersebut diperoleh dari berbagai macam laporan nasabah yang disampaikan kepada bank.. Data tersebut dikelompokkan dan disusun dalam bentuk tersendiri.

Menurut Muchdarsyah Sinungan dalam bukunya **Manajemen Dana Bank** bahwa ada beberapa data atau informasi tentang nasabah dan kegiatan usahanya, yaitu antara lain :

- 1) **Nama dan alamat perusahaan**
- 2) **Akta perusahaan dan susunan pengurus secara lengkap**
- 3) **Bidang usaha nasabah**
- 4) **Maksimum kredit yang diberikan, yaitu jumlah kredit yang dapat dinikmati**
- 5) **Keperluan kredit, dengan menyebutkan secara jelas sesuai dengan bidang usaha**
- 6) **Jangka waktu, dengan menyebutkan juga tanggal jatuh tempo kredit tersebut**
- 7) **Bentuk kredit, dengan menyebutkan apakah berbentuk rekening koran atau bentuk lainnya.**
- 8) **Bunga dan propisi**
- 9) **Agunan, dengan menyebutkan jumlah, jenis, nilai dan cara-cara pengikatannya.**
- 10) **Asuransi, disebutkan maskapai mana, nomor polis dan jumlah nilai penutupannya**
- 11) **Pembayaran bunga, disusun secara bulanan dan disebutkan berapa bunga yang harus dibayar, berapa yang ternyata dibayar dan berapa yang tertunggak**

- 12) Angsuran kredit, disusun seperti halnya no. 11
- 13) *Collectibility*, disebutkan perkembangan kelancaran kredit dari bulan ke bulan misalnya pada bulan Januari tergolong A, tetapi pada bulan April karena penunggakan bunga, digolongkan B akan tetapi karena pada bulan Mei bunga-bunga yang tertunggak dibayar sekaligus maka bulan tersebut kembali kedalam golongan A.
- 14) Keterangan-keterangan tentang *approach* yaitu segala kegiatan yang dilakukan bank dalam rangka *approach* pada debitur dicatat secara sistematis dengan menguraikan secara jelas dan terperinci hasil-hasil *approach* tersebut. (14 : 271)

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa laporan perkreditan harus dibuat secara bulanan untuk diajukan kepada Direksi, guna mengetahui jumlah kredit, sektor usaha yang dibiayai, jangka waktu kredit, bunga dan proporsi kredit serta bentuk dan syarat disposisi kredit, dan sebagainya. Adapun tujuan dari pelaporan tersebut adalah sebagai bahan pertimbangan di dalam menilai calon nasabah apakah layak atau tidak untuk memperoleh kredit

2. 4. Peranan Pengendalian Intern Perkreditan Terhadap Pengamanan Pemberian Kredit Modal Kerja

Bank dalam peranannya sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit maka kegiatan bank hampir seluruhnya terfokus pada kegiatan penyaluran kredit sehingga sumber pendapatan bank mayoritas berasal dari kegiatan pemberian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur merupakan kekayaan bank yang harus benar-benar terjamin mengenai pengembaliannya, karena kredit merupakan suatu yang sangat penting bagi

kelangsungan hidup bank. Oleh karena itu dibutuhkan suatu tindakan-tindakan untuk mengamankan pelaksanaan pemberian kredit.

Adapun yang dimaksud dengan pengertian kredit adalah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya untuk meningkatkan usahanya. Pada dasarnya tujuan dari pemberian kredit adalah untuk meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Bank sebelum memberikan kreditnya kepada debitur, biasanya melakukan penilaian kepada debitur tersebut apakah layak untuk diberikan kredit. Salah satu alat yang digunakan oleh bank untuk menilai calon debitur adalah dengan menggunakan prinsip 5 C. Penilaian permohonan kredit atau yang disebut analisis kredit¹⁶ merupakan salah satu prosedur dalam pelaksanaan pemberian kredit. Adapun prosedur pelaksanaan pemberian kredit tersebut yaitu terdiri dari permohonan kredit, analisis kredit, keputusan atas permohonan kredit, penolakan permohonan kredit, persetujuan permohonan kredit, pencairan fasilitas kredit dan pelunasan fasilitas kredit. Dalam setiap pelaksanaan pemberian kredit tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat membangun pengendalian intern perkreditan seperti adanya pemisahan fungsi, sistem pemberian wewenang dan prosedur pencatatan, unsur praktek yang sehat, dan adanya suatu bagian pengawasan intern.

Bila dilihat dalam prakteknya kredit terdiri dari kredit modal kerja dan kredit investasi. Pada pembahasan dalam makalah ini penulis hanya membatasi pada pengertian kredit modal kerja, karena kredit modal kerja merupakan kredit yang

sangat dibutuhkan oleh nasabah untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah. Kredit memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bank. Dalam kegiatan pemberian kredit kemungkinan terjadinya kredit macet dan resiko kerugian bisa saja terjadi. Untuk memperkecil resiko kerugian maka dibutuhkan suatu pengendalian intern perkreditan, dan alat yang berguna untuk menilai apakah pelaksanaan kredit telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan adalah fungsi pengawasan perkreditan.

Fungsi pengawasan perkreditan merupakan fungsi yang sangat penting dalam usaha untuk pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien guna menghindarkan adanya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mematuhi kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta penyusunan data administratif yang benar. Apabila fungsi pengawasan perkreditan berjalan baik maka keamanan terhadap kredit yang telah diberikan akan benar-benar terjamin.

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1.Obyek Penelitian

3.1.1.Tinjauan Umum Perusahaan

Berikut ini dijelaskan oleh penulis mengenai sejarah singkat, struktur organisasi dan uraian tugas Bank Jabar Cabang Rangkasbitung.

3.1.1.1.Sejarah Singkat Perusahaan

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat adalah bank milik Pemerintah Propinsi Jawa Barat bersama-sama dengan Pemerintah kabupaten se-Jawa Barat dan Banten. Didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.7/GKDH/BPD/61 pada tanggal 20 Mei 1961, dan pada tanggal yang sama diresmikan pendiriannya oleh Pejabat Pemerintah yaitu Ir. H. Djuanda Kartawidjaja dengan modal dasar pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,00 dan terakhir berdasarkan Perda No. 9 tahun 1996 meningkat menjadi Rp. 250 milyar.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat sebagai badan usaha milik Pemerintah Daerah mempunyai misi tertentu yaitu :

- 1) Penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah
- 2) Melaksanakan penyimpanan dan pengelola kas daerah

3) Salah satu sumber pendapatan asli daerah

Sesuai dengan misinya maka landasan hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.
- 2) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang ketentuan Pokok Perbankan.
- 3) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah.

Adapun fungsi dari Bank Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1) **Bank Pembangunan**

Bank Pembangunan adalah bank yang mengumpulkan dana terutama dengan cara menerima simpanan dalam bentuk deposito serta memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang pada bidang pembangunan.

2) **Bank Umum**

Bank Umum adalah bank yang mengumpulkan dananya terutama dengan cara menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito serta memberikan kredit jangka pendek.

3) **Bank Devisa**

Bank Devisa adalah bank yang telah mendapat ijin dari Bank Indonesia (BI) untuk melakukan transaksi lalulintas pembayaran dari atau ke luar negeri.

4) Pemegang Kas Daerah

Sebagai pemegang kas daerah, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat berfungsi melaksanakan penerimaan, penyimpanan, penyaluran uang atas perintah dan berdasarkan ketentuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I dan II.

5) Penyaluran gaji dan pensiun otonom.

6) Pembinaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik Pemerintah Daerah.

Dalam pembinaan Bank Perkreditan Rakyat artinya bahwa Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat membina dan membimbing dalam teknis operasional perbankan, seperti terdapatnya Lembaga perkreditan kecamatan (LPK).

Sejak tahun 1992 aktivitas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 25/84/KEP/DIR tanggal 2 November 1992 serta berdasarkan Perda No. 11 tahun 1995 mempunyai sebutan " Bank Jawa Barat " dengan logo baru.

Untuk memperluas usahanya, maka didirikan cabang-cabang Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat yang berkedudukan di Ibu Kota Propinsi dan Kabupaten, salah satunya adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Rangkasbitung.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, didirikan pada tanggal 13

Agustus 1974 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan dengan No. KEP/948/DJM/111-3/1974.

Adapun tujuan didirikannya bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Rangkasbitung pada prinsipnya sama dengan Bank Jabar lainnya yang berada di Jawa Barat, yaitu :

- 1) Membantu membiayai usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemda Tingkat I Jawa Barat dan Pemda Tingkat II Lebak.
- 2) Membantu membiayai perusahaan daerah baik di Pemda Tingkat I Jawa Barat maupun Pemda Tingkat II Lebak.
- 3) Membantu usaha-usaha yang sifatnya menunjang Pemerintah Daerah baik di sektor swasta maupun Pemerintah.
- 4) Sebagai Lembaga Perbankan, Bank Jabar dapat mengadakan dan meningkatkan kerja sama dengan bank-bank lainnya.

3.1.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Bank Jabar Cabang Rangkasbitung

Pengorganisasian adalah suatu proses yang merancang struktur organisasi formal dengan mengatur, mengelompokkan dan membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien.

Struktur organisasi merupakan suatu bagan yang di dalamnya terlihat adanya pendelegasian wewenang atau adanya suatu pembagian tugas dan tanggung-jawab diantara para karyawan,

2) Kepala Seksi Kredit, tugasnya adalah sebagai berikut :

- (a) Bertanggung jawab atas jalannya operasi kredit.
- (b) Bertanggung jawab atas administrasi yang menyangkut kredit.
- (c) Sebagai pelaksana tugas dan wewenang kepala cabang bila kepala cabang berhalangan.
- (d) Memberikan laporan atau prestasi kerja, sikap dan dedikasi pegawai di lingkungan kerja

3) Kepala Seksi Keuangan, tugasnya adalah sebagai berikut :

- (a) Bertanggung jawab atas jalannya operasional dan administrasi yang menyangkut dengan keuangan.
- (b) Melegalisasi setiap permintaan dan pencairan uang yang berhubungan dengan seksi keuangan sesuai dengan batas wewenangnya.
- (c) Sebagai pelaksana tugas dan wewenang pimpinan cabang bila pimpinan cabang berhalangan.
- (d) Memberikan laporan atas prestasi kerja, sikap dan dedikasi pegawai di lingkungan kerja.

4) Seksi Analisis Kredit, tugasnya yaitu :

- (a) Menerima bahan yang akan dianalisis dari pimpinan yaitu bahan pengajuan kredit dari debitur.
- (b) Membuat analisis terhadap permohonan kredit dari cabang debitur.

- (c) Pengecekan, penilaian jaminan dan membuat berita acara pemeriksaan (BAP).
 - (d) Melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh atasan langsung (pimpinan).
- 5) Seksi Supervisi Kredit, tugasnya adalah sebagai berikut :**
- (a) Mengadakan pembinaan secara periodik pada debitur-debitur.
 - (b) Mengadakan penagihan-penagihan kepada debitur-debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - (c) Bersama-sama dengan analis kredit mengadakan pengecekan jaminan.
 - (d) Melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh atasan (pimpinan).
- 6) Seksi Pelaksana LPK (Lembaga Perkreditan Kecamatan) tugasnya adalah :**
- (a) Membina terhadap lembaga-lembaga perkreditan kecamatan mengenai bank teknisnya.
 - (b) Menilai kesehatan setiap Lembaga Perkreditan Kecamatan.
 - (c) Membuat laporan tentang keadaan kesehatan dari tiap-tiap Lembaga Perkreditan Kecamatan tersebut ke kantor pusat Bank Jawa Barat dan Bank Indonesia.

(c) Pengecekan, penilaian jaminan dan membuat berita acara pemeriksaan (BAP).

(d) Melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh atasan langsung (pimpinan).

5) Seksi Supervisi Kredit, tugasnya adalah sebagai berikut :

(a) Mengadakan pembinaan secara periodik pada debitur-debitur.

(b) Mengadakan penagihan-penagihan kepada debitur-debitur sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

(c) Bersama-sama dengan analis kredit mengadakan pengecekan jaminan.

(d) Melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh atasan (pimpinan).

6) Seksi Pelaksana LPK (Lembaga Perkreditan Kecamatan) tugasnya adalah :

(a) Membina terhadap lembaga-lembaga perkreditan kecamatan mengenai bank teknisnya.

(b) Menilai kesehatan setiap Lembaga Perkreditan Kecamatan.

(c) Membuat laporan tentang keadaan kesehatan dari tiap-tiap Lembaga Perkreditan Kecamatan tersebut ke kantor pusat Bank Jawa Barat dan Bank Indonesia.

- 7) Seksi Pelaksana Administrasi Kredit, bertugas untuk :**
- (a) Menyediakan realisasi dari kredit-kredit yang telah dianalisis oleh bagian analisis kredit.
 - (b) Menyediakan berkas-berkas kredit yang telah dianalisis dan telah direalisasi oleh bagian analisis kredit.
 - (c) Melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh atasan (pimpinan).
- 8) Seksi Pelaksana Tabungan, tugasnya adalah sebagai berikut :**
- (a) Melayani nasabah yang akan menabung, baik tabungan tandamata, simpeda dan tabah.
 - (b) Sebagai operator mesin, membukukan transaksi pada tabungan primanota.
 - (c) Menghitung bunga tabungan.
- 9) Seksi Pelaksana Giro, tugasnya terdiri dari :**
- (a) Melayani nasabah yang akan mengadakan transaksi giro.
 - (b) Mencatat transaksi giro.
 - (c) Menghitung bunga giro yang akan dibayar oleh nasabah.
 - (d) Membuat mutasi harian giro.
 - (e) Membuat neraca sandi giro.
- 10) Seksi Deposito, tugasnya adalah :**
- (a) Melayani nasabah yang akan mengadakan transaksi deposito.
 - (b) Mencatat setiap transaksi deposito.

- (c) Menghitung bunga deposito yang akan dibayar.
- (d) Melakukan pemindahbukuan.

11) Seksi Pelaksana Kas Daerah (Kasda), tugasnya adalah :

- (a) Melayani nasabah yang akan mengadakan setoran Kasda.
- (b) Melayani administrasi pencairan SPMU.
- (c) Mencatat buku Kasda Bank Kabupaten maupun Propinsi.
- (d) Mencatat laporan-laporan yang menyangkut Kasda.

12) Seksi Akuntansi dan Pembukuan, tugasnya adalah :

- (a) Membuat neraca harian dan bulanan
- (b) Membuat laporan mingguan, laporan bulanan, laporan tahunan yang diminta baik oleh Bank Jawa Barat maupun oleh pihak luar, misalnya Bank Indonesia.
- (c) Memeriksa kembali setiap transaksi yang dimasukkan.

13) Sekretaris Umum, tugasnya adalah :

- (a) Membuat order umum dan personalia.
- (b) Mengagendakan surat masuk dan keluar.
- (c) Membuat daftar gaji dan laporan absensi karyawan
- (d) Menghitung Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21.
- (e) Membuat laporan biaya listrik, air, telepon dan kendaraan
- (f) Melayani tamu yang ada kaitannya dengan bank.

14) Kantor Cabang Pembantu, tugasnya adalah :

- (a) Pemeriksaan uang kas operasional KCP pada akhir hari dan pengawasan operasional di KCP tersebut.

- (b) Pembuatan laporan bulanan kredit
- (c) Pelaksanaan kredit dan administrasinya di KCP
- (d) Memberikan penilaian dan prestasi kerja petugas bersama-sama pimpinan cabang induk.

3.1.2. Tinjauan Khusus Perusahaan.

Di bawah ini penulis akan memberikan uraian mengenai aktivitas Bank Jabar Cabang Rangkasbitung.

3.1.2.1. Aktivitas Bank Jawa Barat Cabang Rangkasbitung.

Dalam bidang pengelolaan dana Bank Jabar cabang Rangkasbitung melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :

- 1) **Penghimpunan Dana**, yaitu terdiri dari :
 - (a) Giro, merupakan simpanan nasabah Bank Jabar yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya.
 - (b) Deposito berjangka, merupakan simpanan nasabah pada Bank Jabar yang penarikannya sesuai dengan waktu jatuh tempo dengan lama jangka waktu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan.
 - (c) Simpeda, merupakan bentuk tabungan umum berhadiah pada Bank Jabar yang disediakan untuk nasabah seluruh wilayah Indonesia.

- (d) **Tandamata (Tabungan Anda Masa Datang)**, merupakan tabungan umum berhadiah produk Bank Jabar bagi para penabung di wilayah Jawa Barat.
 - (e) **Tabah (Tabungan Amal Ibadah)**, yaitu tabungan untuk keperluan menunaikan ibadah haji.
- 2) Penggunaan Dana**, terutama dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat untuk berbagai sektor usaha, yaitu :
- (a) **Kredit Modal Kerja (KMK)**, yaitu kredit yang diberikan Bank Jabar untuk pembiayaan modal kerja perusahaan, baik perusahaan perseorangan ataupun yang berbadan hukum.
 - (b) **Kredit investasi (KI)**, yaitu kredit yang diberikan untuk keperluan pengadaan barang-barang aktiva tetap perusahaan, baik perusahaan perseorangan maupun perusahaan yang berbadan hukum.
 - (c) **Kredit Pemilikan Rumah (KPR)**, yaitu fasilitas KPR yang diberikan Bank Jawa Barat untuk membeli rumah tinggal, ruko dan lain-lain (KPRS atau RSS).
 - (d) **Kredit Usaha Tani (KUT)**, yaitu kredit yang diberikan kepada petani untuk menambah modal kerja usahanya.
- 3) Usaha jasa**, terdiri dari :
- (a) **Kiriman uang (KU)**, yaitu jasa pengiriman uang dari suatu kota ke kota lainnya secara cepat dan ekonomis.

Dalam hal ini Bank Jabar bekerjasama dengan BNI dan bekerjasama antar Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia (dalam penyelenggaraan Simpeda).

- (b) Pembayaran pensiun, yaitu jasa layanan untuk pembayaran gaji pensiun yang merupakan kerjasama Bank Jabar dengan PT.Taspen (Persero).
 - (c) Pembayaran listrik merupakan jasa layanan Bank Jabar untuk pembayaran rekening listrik yang merupakan kerjasama dengan PLN.
 - (d) Pembayaran telepon yaitu jasa layanan Bank Jabar dalam rangka penerimaan rekening telepon yang merupakan kerjasama dengan PT. Telkom.
 - (e) ATM Bank Jawa Barat, merupakan sistem pelayanan Bank yang secara elektronik dengan komputer menyatakan penyelesaian transaksi secara otomatis.
- 4) Layanan tertentu lainnya, yaitu sebagai Bank Devisa :**
- Dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran kegiatan ekspor dan impor khususnya di daerah Jawa Barat, transaksi devisa yang telah dapat dilayani adalah :
- (a) Pembukaan *letter of credit*
 - (b) Pembiayaan kredit ekspor dan impor
 - (c) Penerimaan pajak
 - (d) Giro valuta asing

3.2. Metode Penelitian.

3.2.1. Ruang lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini dibutuhkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode studi kasus, yaitu membandingkan teori dengan kenyataan yang terjadi di perusahaan yang berkaitan dengan struktur pengendalian intern perkreditan terhadap pengamanan pemberian kredit modal kerja di Bank Jawa Barat Cabang Rangkasbitung.

3.2.2. Sumber Data.

Sumber data yang diperoleh adalah berupa :

- a) Data primer, merupakan data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan obyek penelitian.
- b) Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari buku-buku acuan, kamus dan sumber-sumber lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

3.2.3. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang diperoleh oleh penulis adalah data kualitatif dan data kuantitatif yaitu terdiri dari sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan aktivitas perusahaan, prosedur

pemberian kredit modal kerja, sistem pencatatan dan dokumen perkreditan, sistem pelaporan perkreditan, serta mengenai pengamanan dana yang dilakukan oleh Bank Jawa Barat Cabang Rangkasbitung.

3.2.4. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Alat dan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- (a) Observasi, yaitu mengamati dan mengikuti secara langsung pelaksanaan daripada objek penelitian khususnya menyangkut masalah sruktur pengendalian intern perkreditan pada pengamanan pemberian kredit modal kerja.
- (b) Wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan kepada pejabat dan staff yang terkait dengan penulisan ini.

3.2.5. Teknik Penganalisaan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, teknik penganalisaan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara membandingkan antara teori dengan kenyataan yang ada di bank yaitu yang berkaitan dengan pelaksanaan sruktur pengendalian intern perkreditan terhadap pengamanan pemberian kredit modal kerja.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Struktur Pengendalian Intern Perkreditan Pada Bank Jawa Barat Cabang Rangkasbitung

Pada bab II telah dinyatakan bahwa suatu struktur pengendalian intern dapat memadai bila unsur-unsur dari pengendalian tersebut ada di dalamnya sebagaimana mestinya. Demikian pula dengan sistem pengendalian intern perkreditan pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung.

Dalam rangka untuk memberikan jaminan yang memadai terhadap seluruh kegiatan perkreditan maka Bank Jawa Barat Cabang Rangkasbitung telah melaksanakan pengendalian intern perkreditan. Pelaksanaan pengendalian intern perkreditan pada Bank Jawa Barat Cabang Rangkasbitung diterapkan pada seluruh kegiatan perkreditan. Berikut ini penulis akan menjelaskan mengenai pengendalian intern dalam prosedur pelaksanaan pemberian kredit pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung.

4.1.1. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit Pada Bank Jawa Barat Cabang Rangkasbitung

Pihak Bank, dalam hal ini Bank Jawa Barat Cabang Rangkasbitung memiliki prosedur tertentu dalam memproses suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur. Untuk menjamin keamanan dari setiap

transaksi maka pada setiap prosedur telah terdapatnya pemisahan fungsi yaitu fungsi otorisasi, fungsi pelaksanaan, fungsi pencatatan, dan fungsi pengawasan. Prosedur-prosedur ini cukup relatif sederhana sehingga memudahkan pihak bank dalam melakukan pengawasan kredit. Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis akan menguraikan prosedur pelaksanaan pemberian kredit pada Bank Jawa Barat Cabang Rangkasbitung, yaitu terdiri dari :

- 1) **Prosedur Permohonan Kredit**
- 2) **Prosedur Penyelidikan dan Analisis Kredit**
- 3) **Prosedur Keputusan Kredit**
- 4) **Prosedur Pengikatan Kredit dan Agunan Kredit**
- 5) **Prosedur Pemberian Kredit**
- 6) **Prosedur Pengawasan Kredit**
- 7) **Prosedur Pelunasan Kredit**

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan pemberian kredit pada Bank Jawa Barat Cabang Rangkasbitung adalah sebagai berikut :

1) Prosedur Permohonan Kredit

Dalam prosedur permohonan kredit tindakan selektif telah dilaksanakan sejak permohonan kredit diajukan oleh calon debitur, yaitu :

- 1) Mengadakan wawancara terhadap calon debitur untuk mengetahui gambaran usaha debitur, yang dilakukan oleh Kasi Kredit.
- 2) Melakukan penelitian terhadap formulir permohonan kredit beserta lampirannya untuk mempertimbangkan apakah permohonan kredit dapat diproses lebih lanjut atau tidak.

Adapun hal-hal yang harus dilengkapi oleh calon debitur dalam formulir permohonan kredit tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Keterangan mengenai calon debitur, yaitu mencakup :
 - (a) Nama dan alamat calon debitur (untuk perorangan)
 - (b) Nama dan alamat Perusahaan (untuk debitur badan usaha)
 - (c) Bidang usaha debitur
 - (d) Surat keterangan ijin usaha
 - (e) Riwayat kredit yang pernah diambil
- 2) Keterangan mengenai kredit yang diminta, yaitu terdiri dari :
 - (a) Jumlah permintaan kredit
 - (b) Tujuan penggunaan kredit
 - (c) Jangka waktu penggunaan kredit
- 3) Keterangan mengenai gambaran rencana usaha, adalah :
 - (a) Keterangan mengenai usaha calon debitur sekarang
 - (b) Latar belakang yang mendorong calon debitur untuk mengajukan kredit, misalnya karena adanya rencana usaha.
- 4) Keterangan mengenai jaminan yang akan diberikan, yaitu terdiri dari :

(a) Jaminan pokok yaitu meliputi jenis jaminan, nilai asuransinya, nilai polisnya masa berlakunya dan nama perusahaan asuransinya.

(b) Jaminan tambahan, yaitu tambahan jaminan yang berguna untuk menambah keyakinan bank dalam memberikan kredit.

Formulir permohonan kredit tersebut setelah diisi dan ditandatangani oleh calon debitur kemudian diserahkan kepada Seksi Administrasi kredit dengan dilengkapi beberapa lampiran yang diperlukan. Lampiran-lampiran tersebut antara lain :

- (a) Fotocopy KTP calon debitur yang masih berlaku
- (b) Fotocopy NPWP untuk permohonan di atas Rp. 50 juta
- (c) Fotocopy akta pendirian berikut seluruh akta perubahannya yang didukung surat pernyataan bahwa akta tersebut akta terakhir
- (d) Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- (e) Data keuangan (neraca, laporan rugi laba, dan lain-lain)

Setelah permohonan kredit dan lampirannya dilengkapi kemudian diperiksa dan diteliti oleh Kasi Kredit dan diserahkan pada Seksi Administrasi Kredit untuk dicatat dalam buku registrasi dan diberi cap serta tanggal sebagai tanda terima.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam prosedur permohonan kredit telah menunjukkan adanya pengendalian intern yang baik pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung yang terlihat

dari adanya formulir permohonan kredit sebagai suatu bukti transaksi kredit, serta telah terdapatnya pemisahan fungsi yang jelas.

2) Prosedur Penyelidikan dan Analisis Kredit

Prosedur penyelidikan dan analisis kredit merupakan prosedur yang paling menentukan terhadap persetujuan atau penolakan kredit. Pada prosedur analisis kredit ini yang berwenang untuk melakukan analisis kelayakan kredit adalah Seksi Analisis Kredit, maka di sini terlihat adanya pemisahan fungsi antara bagian yang menerima permohonan kredit dengan bagian yang menganalisis kredit. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan kemudian Sub Sie Analisis Kredit melakukan analisis kredit dengan berpegang pada buku pedoman kredit dan aspek-aspek penilaian pemberian kredit. Adapun aspek-aspek penilaian dalam pemberian kredit tersebut adalah sebagai berikut :

a) Aspek Manajemen

Dalam aspek manajemen ini bertujuan untuk menilai latar belakang reputasi dari calon debitur dalam menjalankan usahanya. Penilaian terhadap aspek manajemen ini meliputi :

(1) Riwayat Pemohon, yaitu meliputi :

- (a) Siapa pemohon, pendidikan, pengalaman usaha, kemampuan usaha dan kekuatan modal serta latar belakang keluarga.
- (b) Kemampuan manajemen dan teknis

- (c) Catatan reputasi (hubungan baik dengan bank, dan dengan pengusaha serta jabatan yang dipegangnya).

(2) Riwayat Perusahaan, yaitu meliputi :

- (a) Bentuk perusahaan dan sejarah singkat perusahaan
- (b) Susunan kepengurusan, tenaga kerja serta komposisi permodalan
- (c) Gambaran mengenai pengelolaan administrasi perusahaan dan pengalaman perusahaan dalam bisnisnya

b) Aspek Yuridis atau Hukum

Penilaian pada aspek hukum ini mencakup usaha calon debitur dan jaminan yang diberikan. Tujuan dari penilaian aspek hukum ini adalah agar bank mempunyai kekuatan hukum di dalam memberikan kreditnya kepada calon debitur. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek hukum ini yaitu :

- (a) Bentuk hukum dari usaha calon debitur, apakah berbentuk CV, PT, Firma, Koperasi atau Perorangan.
- (b) Meneliti keaslian surat-surat dari calon debitur, meliputi :
 - (1) Akta pendirian perusahaan
 - (2) Fotocopy kartu pengenal orang yang bertanggungjawab
 - (3) Surat izin tempat usaha
- (c) Hal-hal yang berhubungan dengan jaminan calon debitur.

c) Aspek Teknis Proyek

Penilaian terhadap aspek teknis ini bertujuan untuk dapat mengetahui kemampuan pimpinan perusahaan beserta

karyawannya dalam menjalankan bidang usahanya dan dalam menghasilkan produk yang dikehendaki. Penilaian terhadap aspek teknis ini meliputi :

(1) Gambaran Proyek, yaitu meliputi :

(a) Lokasi Usaha, yaitu memperhatikan apakah lokasi usaha debitur cukup strategis sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan persediaan bahan baku, sarana dan prasarana, tenaga kerja serta kemudahan dalam memasarkan produk yang dihasilkan.

(b) Gambaran proyek secara singkat

(2) Proses Produksi

Proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan calon debitur apakah cukup efisien. Begitu juga harus diteliti mengenai kapasitas normal dan prosentase tingkat kerusakan.

(3) Fasilitas yang dimiliki

(a) Bahan baku dan bahan pembantu, berhubungan dengan kemudahan memperoleh bahan baku dan bahan pembantu.

(b) *Lay out*, yaitu penilaian terhadap *lay out* berkaitan dengan tata letak dari mesin yang digunakan calon debitur.

d) Aspek Pemasaran

Penilaian terhadap aspek pemasaran ini bertujuan untuk mengetahui apakah produk yang hendak dihasilkan dapat dijual sesuai dengan yang direncanakan serta untuk menilai prospek perusahaan calon debitur. Penilaian terhadap aspek pemasaran ini meliputi :

- (1) Jenis barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan calon debitur yaitu mengenai kegunaannya, mutu dan harganya.
- (2) Daerah dan karakteristik pasar
- (3) Strategi pemasaran produk yang dilakukan calon debitur. Promosi yang dilakukan apakah dengan menggunakan media cetak, elektronik atau hanya dengan brosur.
- (4) Saluran distribusi pemasaran produk tersebut apakah menggunakan agen tunggal, pengecer atau langsung memasarkan sendiri.

e) Aspek Keuangan

Tujuan dari penilaian terhadap aspek keuangan ini adalah untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan debitur. Hal ini perlu dilakukan karena pendapatan yang diterima oleh calon debitur merupakan salah satu sumber keuangan bagi pemohon kredit di dalam melakukan pembayaran kembali

atas kredit yang diterimanya. Penilaian dari segi keuangan ini terdiri dari :

- (1) Analisis laporan rugi laba , neraca dan cash flow
- (2) Analisis rasio yaitu terdiri dari :
 - (a) Analisis likuiditas
 - (b) Analisis Solvabilitas
 - (c) Analisis Aktivitas
 - (d) Analisis Profitabilitas
- (3) Kemampuan penyediaan modal kerja
- (4) Perhitungan kebutuhan modal kerja
- (5) Rencana pengembalian kredit yaitu berdasarkan pada anggaran perusahaan calon debitur.

f) Aspek Ekonomi Pembangunan

Analisis terhadap aspek ekonomi pembangunan ini bertujuan untuk melihat seberapa besar sumbangan proyek terhadap pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Hal-hal yang berhubungan dengan penilaian dalam aspek ekonomi pembangunan ini meliputi :

- (1) Penciptaan lapangan pekerjaan
- (2) Pendayagunaan sumber alam secara efisien
- (3) Mobilisasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan tenaga ahli, meningkatkan cadangan devisa dan alih teknologi

(4) Penciptaan nilai tambah terhadap pendapatan daerah ataupun pendapatan negara.

Selain dari aspek-aspek tersebut, Bank Jabar cabang Rangkasbitung juga melakukan suatu pertimbangan pemberian kredit dengan menggunakan analisis 5 C yaitu yang terdiri dari :

1) *Character*

Salah satu penilaian pihak bank dan mempertimbangkan dan memutuskan pemberian kredit adalah watak dari calon debitur baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam usahanya.

2) *Capacity*

Capacity adalah suatu penelitian terhadap calon debitur mengenai kemampuannya dalam melunasi kewajibannya dan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usahanya.

3) *Capital*

Penilaian mengenai capital merupakan upaya bank melihat struktur modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal sendiri (*owner equity*) yang dimiliki calon debitur maka semakin dipercayanya debitur tersebut dalam menangani proyek-proyeknya.

4) *Collateral*

Collateral yaitu penilaian terhadap jaminan yang diserahkan oleh debitur berupa harta bendanya atau memilih pihak lain yang diikutkan sebagai jaminan. Jaminan ini merupakan

upaya terakhir bagi bank jika kredit yang diberikan terjadi kemacetan.

5) *Condition of economy*

Kondisi perekonomian merupakan faktor yang akan mempengaruhi maju mundurnya perusahaan debitur.

Dari uraian di atas maka terlihat bahwa dalam prosedur analisis kredit telah mempunyai praktek-praktek yang sehat dan pembagian tugas telah dilaksanakan dengan jelas, serta terdapatnya standarisasi dalam buku pedoman kredit. Dengan demikian maka pelaksanaan analisis kredit pada Bank Jabar telah mencerminkan adanya pengendalian intern yang memadai.

3) Prosedur Keputusan Kredit

Setelah dilakukan berbagai aspek penilaian terhadap calon debitur maka berdasarkan hasil analisis yang dibuat oleh sub ^{seksi} analisis kredit dibuatlah suatu keputusan kredit. Untuk kredit yang diputuskan sendiri oleh Cabang, maka kebijaksanaan dalam memutuskan kredit dipegang oleh Pimpinan Cabang dan untuk memperlancar dalam pemberian kredit maka Pimpinan Cabang mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Kasi Kredit dalam pengambilan keputusan untuk jumlah tertentu. Sedangkan untuk kredit yang diputuskan oleh Kantor Pusat, keputusan kredit ada pada Direksi, tapi bila di atas wewenang Direksi maka keputusan ada pada Badan Pengawas atau

perlu dibahas oleh Komite Kredit. Keputusan kredit ini terdiri dari keputusan penolakan kredit dan keputusan persetujuan kredit yaitu :

(a) Keputusan Penolakan Kredit

Apabila permohonan kredit ditolak maka Pimpinan Cabang segera memberitahukan kepada pemohon kredit, dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Penolakan Kredit dan disertai dengan alasan-alasan penolakan kredit tersebut.

(b) Keputusan Persetujuan Kredit

Apabila permohonan kredit disetujui oleh Pimpinan Cabang kemudian menyerahkan Surat Keputusan Kredit yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Cabang beserta lampirannya kepada Seksi Administrasi Kredit. Selanjutnya Seksi Administrasi Kredit mengeluarkan Surat Pemberitahuan dan membuat dokumen akad kredit dan pengikatan agunan, asuransi barang agunan, dan formulir instruksi pencairan kredit. Untuk proses pencairan kreditnya debitur berhubungan dengan petugas Teller dengan membawa buku cek atau kwitansi penarikan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam prosedur keputusan kredit telah diterapkan praktek-praktek yang sehat yaitu dengan adanya pembagian tugas dan pendelegasian wewenang serta bukti-bukti transaksi kredit, sehingga dengan demikian tercermin adanya pengendalian intern yang memadai.

4) Prosedur Pengikatan Kredit dan Agunan Kredit

Apabila permohonan kredit tersebut telah disetujui oleh Pimpinan Cabang kemudian surat permohonan tersebut beserta lampirannya diserahkan ke Seksi Administrasi Kredit, selanjutnya Seksi Administrasi Kredit mengeluarkan syarat-syarat pengikatan kredit dan membuat dokumen akad kredit serta pengikatan agunan kredit.

Untuk melakukan pengendalian intern pada prosedur pengikatan kredit maka syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur adalah :

- (a) Pihak bank telah menerima tembusan SP3K yang ditandatangani oleh calon debitur di atas materai yang cukup.
- (b) Calon debitur telah memenuhi seluruh ketentuan SP3K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit).
- (c) Calon debitur telah menyerahkan bukti asli kepemilikan barang agunan kredit sebagaimana yang tercantum dalam SP3K.
- (d) Atas penyerahan bukti kepemilikan agunan kredit tersebut dibuat tanda terima dan dicatat dalam buku register agunan.

Dalam rangka untuk mengamankan kredit maka terhadap jaminan yang diberikan debitur, Bank Jabar Cabang Rangkasbitung telah menetapkan syarat-syarat yuridis sebagai berikut :

- 1) Jaminan merupakan milik debitur yang bersangkutan
- 2) Tidak berada dalam persengketaan dengan pihak lain
- 3) Bukti-bukti kepemilikan yang ada memenuhi syarat untuk diadakan pengikatan bank secara hipotik, fiducia, dan kuasa menjual.

Untuk memperkecil resiko atas kredit dan menjamin kepentingan bank maka apabila terjadi kehilangan atau kebakaran terhadap barang jaminan maka semua jaminan yang ada di Bank Jabar Cabang Rangkasbitung telah diasuransikan kepada PT. Askrimdo, sehingga pembayaran ganti rugi dapat langsung dibayar kepada bank dan setiap polis dicantumkan “ *Banker’s Clause* Bank Pembangunan Daerah Cabang Rangkasbitung”.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam prosedur pengikatan kredit dan pengikatan agunan telah mencerminkan adanya pengendalian intern yang memadai yang terlihat dari pengendalian fisik atas harta perusahaan dan adanya pembagian tugas yang jelas.

5) Prosedur Pemberian Kredit

Untuk melakukan pengendalian intern terhadap prosedur pemberian kredit maka Bank Jabar Cabang Rangkasbitung dalam menentukan realisasi kredit memiliki beberapa prosedur tertentu yang harus dipenuhi oleh calon debitur yaitu terdiri dari :

- a) Seluruh dokumen pengikatan kredit dan pengikatan agunan telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dan dari pihak bank oleh Pimpinan Cabang dan Kasi Kredit.
- b) Biaya kredit baik provisi kredit, biaya notaris, dan biaya asuransi telah dibebankan pada debitur.

Sedangkan hal-hal yang harus dipenuhi oleh debitur untuk mengamankan kredit adalah :

- (a) Debitur telah menyerahkan bukti perikatan kredit
- (b) Penggunaan dana kredit harus sesuai dengan pos-pos dalam rencana penggunaan kredit yang telah disepakati.
- (c) Debitur telah menandatangani kwitansi realisasi kredit yang telah disetujui oleh Pimpinan Cabang

Berdasarkan uraian di atas maka terlihat bahwa dalam prosedur pemberian kredit telah mencerminkan adanya pengendalian intern pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung yaitu bahwa otorisasi telah dilaksanakan sesuai batas kewenangannya dan telah terdapatnya dokumen-dokumen yang cukup memadai.

6) Prosedur Pengawasan Kredit

Dalam usaha untuk mencegah terjadinya ketidaklancaran atau kemacetan kredit maka tindakan yang harus dilakukan oleh Bank Jabar Cabang Rangkasbitung sesudah kredit diberikan adalah tindakan pengawasan kredit. Tugas pengawasan kredit dilakukan oleh Seksi Supervisi Kredit. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pengawasan kredit adalah :

- (a) Hasil analisis kredit oleh Seksi Analisis Kredit
- (b) Daftar nominatif kredit
- (d) Laporan yang diberikan oleh debitur

Bank Jabar Cabang Rangkasbitung melakukan pengawasan kredit secara pasif dan aktif. Pengawasan secara pasif adalah dengan memeriksa kegiatan operasi nasabah melalui laporan-laporan debitur yang wajib disampaikan pada bank setiap bulan. Sedangkan pengawasan secara aktif adalah dengan melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha debitur yang dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Pihak bank melakukan pengawasan kredit dengan maksud untuk melakukan pembinaan kepada debitur dengan mendorong perkembangan usaha debitur dan meningkatkan kolektibilitas debitur yang kurang lancar sehingga terhindar dari kredit macet.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Bank Jabar Cabang Rangkasbitung telah menerapkan pengendalian intern pada prosedur pengawasan kredit walaupun masih ada beberapa kelemahan dalam pengendalian tersebut yaitu pengawasan kredit hanya dilakukan setiap tiga bulan sekali, padahal kredit memiliki resiko terhadap kerugian yang harus sesering mungkin dilakukan pengawasan.

7) Prosedur Pelunasan Kredit

Pengendalian yang dilakukan pada prosedur pelunasan kredit adalah dengan mengamati tingkat pelunasan kredit debitur yang dilakukan oleh Seksi Akuntansi, sehingga dapat diketahui kolektibilitas debitur tersebut apakah termasuk lancar, kurang lancar, atau kredit macet.

Jika terjadi masalah dalam pelunasan kredit maka Seksi Akuntansi segera melaporkan ke Kasi Kredit kemudian Kasi Kredit meminta bagian Supervisi dan Akuntansi untuk mengunjungi debitur dan mencari tahu penyebab ketidaklancaran pelunasan kredit dan hal ini akan didiskusikan dengan pihak debitur.

Apabila hasil peninjauan membuktikan bahwa terjadi masalah yang cukup sulit tetapi kredit masih bisa diselamatkan maka tindakan yang harus dilakukan untuk mengamankan kredit adalah :

- (a) Melakukan penjadwalan kembali jangka waktu kredit
- (b) Melaksanakan persyaratan kembali kredit
- (c) Menambah jumlah kredit

Adapun pengendalian yang dilakukan dalam prosedur pelunasan kredit pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung adalah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Bukti asli kepemilikan agunan kredit dapat diserahkan kepada debitur yang bersangkutan serta dibuat dalam Surat Tanda Penyerahan atau Penerimaan, kemudian ditandatangani sebagai tanda terima dalam buku register agunan.
- (b) File kredit yang sudah lunas dipindahkan dari file kredit yang masih efektif serta diadministrasikan secara terpisah.
- (c) Atas pelunasan kredit tersebut kemudian diagendakan dengan baik oleh Bank Jabar Cabang Rangkasbitung.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam prosedur pelunasan kredit pengendalian intern telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya pemisahan fungsi yang cukup jelas dan adanya dokumen-dokumen sebagai bukti transaksi kredit yang telah cukup memadai pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung.

4.1.2. Sistem Pencatatan Perkreditan pada Bank Jabar Cabang Rangkas Bitung

Pada tahap pencatatan, yang bertanggungjawab melakukan pencatatan secara keseluruhan adalah Seksi Administrasi Kredit, sedangkan pencatatan setiap prosedur kredit dilakukan oleh bagiannya masing-masing. Dengan demikian terdapat unsur pengendali yaitu pencatatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian harus sesuai dengan Seksi Administrasi Kredit

Setiap pencatatan dan dokumen perkreditan baik yang diterima dari debitur maupun yang diterbitkan oleh Bank Jabar harus diadministrasikan dalam buku dan kartu kredit, yaitu :

- (a) Buku agenda permohonan kredit
- (b) Kartu teknis kredit
- (c) Buku realisasi kredit

Sistem pencatatan perkreditan pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung telah cukup baik, karena dalam kegiatan pencatatan kredit

ini telah terdapatnya dokumen sebagai bukti atas suatu transaksi. Dalam penyelenggaraan dokumen ini telah dipisahkan menjadi dua file yaitu :

a) File kerja kredit, yaitu terdiri dari :

- (1) Surat permohonan kredit
- (2) Foto copy perijinan perusahaan
- (3) Hasil analisis kredit berikut lampirannya (laporan keuangan, dll.)
- (4) Surat keputusan kredit
- (5) Salinan perjanjian kredit dan pengikatan agunan

b) File Agunan dan Legalitas Kredit, yaitu terdiri dari :

- (1) Fotocopy SP3K yang telah ditandatangani oleh debitur di atas materai yang cukup.
- (2) Perjanjian kredit baik yang dibawah tangan atau notariil berikut lampirannya.
- (3) Kuitansi penarikan kredit
- (4) Bukti asli dokumen pemilikan agunan
- (5) Fotocopy tanda terima bukti asli pemilikan agunan kredit

Setelah itu, kedua file tersebut harus dibuat daftar isi yang menggambarkan seluruh dokumen yang ada. Khusus untuk file agunan dan legalitas kredit harus disimpan dalam lemari besi tahan api dengan sistem penyimpanan yang mengandung unsur pengendalian ganda.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pencatatan kredit pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung telah memenuhi pengendalian intern yang memadai, sehingga akan

berpengaruh terhadap kolektibilitas kelancaran kredit debitur dan jaminan kewanitaan kredit.

4.1.3. Sistem Pelaporan Perkreditan pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung

Salah satu unsur yang dapat menunjang pengendalian intern perkreditan adalah adanya laporan, sebagai pertanggungjawaban kegiatan pemberian kredit. Pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung yang bertanggung jawab untuk membuat laporan perkreditan adalah Seksi Akuntansi, kemudian direview oleh pengawas audit. Setelah Seksi Akuntansi membuat laporan kegiatan perkreditan dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang kemudian laporan tersebut wajib dikirimkan kepada Biro pengawasan, yaitu laporan nominatif kredit.

Adapun tujuan dari pembuatan laporan adalah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat, sehingga adanya suatu pengendalian intern terhadap pelaksanaan kredit. Laporan yang ada pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung telah cukup baik karena telah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- (1) Tepat waktu
- (2) Tepat guna
- (3) Tepat nominal
- (4) Sederhana dan jelas

Berdasarkan laporan yang dibuat oleh Seksi Akuntansi maka terlihat bahwa selama ini tingkat kolektibilitas dari debitur secara keseluruhan telah cukup baik, tapi masih ada beberapa debitur yang pengembalian kreditnya kurang lancar atau mengalami kredit macet. Pihak Bank dalam mengatasi kredit macet ini telah membuat laporan mengenai kredit macet dan disampaikan pada perusahaan asuransi (PT. Askrindo), sehingga dengan demikian keamanan terhadap kredit akan terjamin

Untuk melakukan pengendalian terhadap pelaporan perkreditan maka ada beberapa data atau informasi yang diperlukan oleh Seksi Akuntansi untuk melaporkan kegiatan pemberian kredit pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung yaitu terdiri dari :

- 1) Semua debitur yang memperoleh fasilitas kredit wajib dilaporkan
- 2) Plafond kredit diisi sesuai jumlah maksimum kredit yang diterima
- 3) Jangka waktu kredit diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun berlaku serta berakhirnya kredit yang dalam perjanjian kredit.
- 4) Saldo pokok yaitu jumlah saldo debit rekening kredit pada tanggal laporan dan jumlahnya harus sesuai dengan neraca bulanan.
- 5) Pendapatan bunga per bulan dicatat sesuai dengan realisasinya.
- 6) Periode dan besarnya angsuran kredit harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit.
- 7) Tunggakan pokok dan bunga adalah jumlah yang wajib dibayar pada tanggal yang telah ditentukan.

8) Kolektibilitas yaitu penggolongan kolektibilitas kredit harus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pelaporan perkreditan telah mencerminkan adanya pengendalian intern yang cukup memadai yang terlihat dari adanya pemisahan fungsi, pelimpahan wewenang sesuai batas kewenangannya dan dokumen yang cukup memadai yang dapat mendukung pengamanan kredit.

4.2. Peranan Struktur Pengendalian Intern Perkreditan Terhadap Pengamanan Pemberian Kredit Modal Kerja pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung

Suatu bank dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan membutuhkan peranan pengendalian intern untuk dapat melihat bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai dan memberikan jaminan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat dikendalikan. Agar struktur pengendalian intern yang dimiliki perusahaan memberikan jaminan yang memadai, maka harus ada sistem informasi yang memadai pula, karena salah satu tujuan dari sistem informasi adalah meningkatkan pengendalian intern. Bank Jabar telah menerapkan pengendalian intern perkreditan, hal ini dapat terlihat dari adanya pemisahan fungsi dalam prosedur pelaksanaan pemberian kredit. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan penulis uraikan mengenai pelaksanaan dari pemberian kredit modal kerja pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung.

4.2.1. Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapatlah diketahui bahwa pelaksanaan pemberian kredit modal kerja pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung telah cukup memadai, karena dalam prosedur pemberian kredit tersebut cukup sederhana dan jelas, sehingga dari prosedur-prosedur tersebut akan memberikan jaminan keamanan pada setiap transaksi kredit. Adapun prosedur-prosedur tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) Prosedur permohonan kredit
- (2) Prosedur penyelidikan dan analisis kredit
- (3) Prosedur keputusan kredit
- (4) Prosedur pengikatan kredit dan agunan kredit
- (5) Prosedur pemberian kredit
- (6) Prosedur pengawasan kredit
- (7) Prosedur pelunasan kredit

Pemberian kredit dapat dilakukan dengan sistematis karena adanya prosedur tersebut, dan pada setiap prosedur terdapat pemisahan fungsi. Dengan adanya pemisahan fungsi yang baik terjadinya penyimpangan akan dapat diantisipasi karena tertutupnya kemungkinan petugas bank untuk menangani kegiatan kredit dari awal sampai akhir. Pengendalian dalam prosedur pemberian kredit ini terlihat sebagai berikut :

- 1) Pada prosedur permohonan kredit telah terdapat pengendalian intern yang cukup memadai yang terlihat dari adanya penyelidikan terhadap calon debitur melalui wawancara oleh Kasi Kredit dan formulir permohonan kredit sebagai bukti atas suatu transaksi kredit.
- 2) Penyelidikan dan analisis terhadap permohonan kredit telah mengandung unsur pengendalian intern yang cukup baik yaitu adanya praktek yang sehat, yang tercermin dari adanya standarisasi terhadap buku pedoman kredit, pembagian tugas dan adanya penilaian terhadap pemberian kredit yang berpedoman pada prinsip 5 C dan aspek-aspek penilaian pemberian kredit.
- 3) Keputusan terhadap pemberian kredit dilakukan oleh Pimpinan Cabang sesuai dengan batas kewenangannya, selain itu terdapatnya suatu pendelegasian wewenang terhadap Kasi Kredit untuk memperlancar kegiatan pemberian kredit serta bukti-bukti transaksi kredit. Berdasarkan hal tersebut maka pengendalian intern terhadap prosedur keputusan kredit telah cukup memadai.
- 4) Pelaksanaan dari pengikatan kredit dan agunan kredit dilakukan oleh kasi kredit. Dalam pengikatan kredit harus ada kesepakatan antara pihak bank dan pihak debitur. Selain itu telah terdapatnya pengikatan jaminan yang merupakan pengendalian terhadap kredit yang diberikan. Berdasarkan hal ini maka pengendalian intern pada prosedur pengikatan dan agunan kredit telah dilaksanakan dengan baik.

- 5) Dalam pelaksanaan pemberian kredit dilakukan oleh bagian Teller setelah diotorisasi oleh Pimpinan Cabang. Dengan demikian terlihat adanya pemisahan fungsi yang jelas yaitu fungsi otorisasi dan fungsi pelaksanaan, yang dapat menunjang pengendalian intern yang baik.
- 6) Pengawasan kredit dilaksanakan oleh bagian Supervisi Kredit dan Analisis Kredit yang menangani langsung pemberian dan penggunaan kredit. Berdasarkan hal ini maka terlihat adanya pemisahan fungsi yang dapat menunjang unsur-unsur pengendalian intern perkreditan.
- 7) Pada tahap pelunasan kredit dilakukan otorisasi oleh Pimpinan Cabang dan diagendakan sebagai bukti pelunasan kredit oleh Seksi Akuntansi. Selanjutnya dibuat laporan perkreditan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang tepat, sehingga adanya pengendalian intern yang baik terhadap kegiatan kredit.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian kredit modal kerja pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung telah cukup memadai karena pada pelaksanaan pemberian kredit tersebut telah mengandung unsur-unsur pengendalian intern. Maka dari itu, dengan pengendalian intern yang cukup memadai maka pengamanan terhadap kolektibilitas kredit debitur akan terjamin. Sehingga dengan demikian terjadinya resiko kerugian terhadap kegiatan pemberian kredit seperti adanya kegagalan debitur atau terjadinya kredit macet, akan dapat dihindarkan. Dan hal ini terlihat pada tabel berikut ini :

**TABEL I
KOLEKTIBILITAS KREDIT
1998-2000**

TAHUN	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
1998	82 %	11 %	5 %	2 %
1999	88 %	8 %	4 %	-
2000	93 %	5 %	2 %	-

Sumber : Bank Jabar Cabang Rangkasbitung

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jumlah kredit yang diberikan termasuk kategori lancar setiap tahun mengalami perkembangan positif, yaitu dari 82 % kredit lancar pada tahun 1998 dapat ditingkatkan sampai 93 % pada tahun 2000, dan usaha untuk terus menekan resiko pengembalian dalam kategori kredit kurang lancar pada tahun 2000 dapat ditekan sampai 5 %, serta kredit yang diragukan dan macet dapat ditekan sampai sekecil mungkin.

Atas dasar uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa dengan kolektibilitas kredit yang cukup baik maka pendapatan bunga yang diperoleh mengalami pertambahan yang positif. Dengan demikian berarti pengamanan terhadap kredit tersebut telah cukup memadai dan pengendalian telah mencapai sasaran yang cukup berarti khususnya dalam meminimalisasian resiko pengembalian kredit yang dapat menjamin keamanan kredit pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung.

4.2.2. Peranan Struktur Pengendalian Intern Perkreditan Terhadap Pengamanan Pemberian Kredit Modal Kerja

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung maka dapatlah diketahui bahwa struktur pengendalian intern perkreditan pada Bank Jabar telah memberikan jaminan yang memadai karena pelaksanaan dari pemberian kredit pada Bank Jabar telah mengandung unsur-unsur yang dapat menunjang pengendalian intern. Dan hal ini dapat terlihat dari adanya pengendalian intern pada setiap prosedur dalam pemberian kredit, yaitu seperti adanya pemisahan fungsi antara fungsi otorisasi, fungsi pelaksanaan, fungsi pencatatan dan fungsi pengawasan.

Pada pelaksanaan dan pelaporan perkreditan telah mengandung unsur-unsur pengendalian intern yang memadai yang tercermin dari adanya pemisahan fungsi yang jelas pada setiap bagian, formulir-formulir kredit, dokumen-dokumen dan laporan perkreditan sebagai bukti transaksi kredit serta terdapatnya pengawasan terhadap debitur atas penggunaan kredit tersebut.

Selain itu, dalam prosedur pemberian kredit modal kerja telah terdapat suatu penilaian terhadap kualitas dari penggunaan kredit dan pembinaan terhadap debitur apabila pengembalian kredit mengalami kurang lancar atau macet yaitu dengan melakukan pengamanan terhadap kredit tersebut melalui penjadwalan kembali jangka waktu kredit, serta

memberikan saran-saran untuk perbaikan setiap kelemahan yang ada dan membimbing debitur sehingga terhindar dari kredit macet.

Mengingat kredit merupakan kekayaan bank yang memiliki resiko tinggi terhadap kerugian maka untuk menjaga pelaksanaan dai pemberian kredit tersebut dibutuhkan suatu struktur pengendalian intern perkreditan yang memadai, sehingga keamanan penggunaan kredit khususnya kredit modal kerja akan memberikan jaminan yang memadai.

Dari uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa struktur pengendalian intern yang baik memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga keamanan dari kegiatan pemberian kredit modal kerja agar dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Oleh karena itu, dengan adanya pengendalian intern yang baik dan pengamanan yang memadai maka kelangsungan hidup bank akan dapat terjamin.

BAB V

RANGKUMAN KESELURUHAN

Pada masa pembangunan dewasa ini pemerintah berusaha untuk meningkatkan kinerja di segala bidang terutama dalam bidang perekonomian. Krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia sekarang ini dirasakan sangat berpengaruh terhadap laju pembangunan perekonomian yang sedang berjalan. Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sangat diperlukan untuk menunjang meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Salah satu kegiatan pokok perbankan adalah sebagai pemberi kredit bagi perorangan maupun bagi perusahaan yang membutuhkan dana.

Adapun kredit yang diberikan oleh Bank Jabar Cabang Rangkasbitung adalah terdiri dari kredit jangka pendek, kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang. Tujuan dari kegiatan pemberian kredit adalah untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya ataupun untuk pembangunan proyek baru, seperti pemberian kredit modal kerja, kredit investasi, kredit modal kerja permanen, kredit modal kerja variabel dan kredit pemilikan rumah. Mengingat pentingnya kredit bagi bank, maka dibutuhkan suatu alat bantu untuk memberikan jaminan yang memadai terhadap kegiatan pemberian kredit.

Suatu alat bantu yang dibutuhkan untuk memberikan jaminan yang memadai terhadap kegiatan pemberian kredit adalah struktur pengendalian intern. Dalam pengendalian intern ini bank harus memiliki manajemen yang baik yang didukung

oleh personil yang baik pula. Selain itu, diperlukan adanya sistem dan prosedur yang menggambarkan adanya pengendalian intern yang memadai, sehingga kredit yang diberikan dapat tersalurkan dengan tepat.

Dalam dunia perbankan, kegiatan penyaluran kredit kepada para debiturnya merupakan hal yang paling dominan. Melalui kredit ini bank akan memperoleh keuntungan yaitu pendapatan bunga kredit yang diterima dari debitur. Bank berkepentingan atas dana yang disalurkan dalam hal ini kredit modal kerja, karena dana tersebut berasal dari nasabah yang menyimpannya di bank. Untuk kredit jangka pendek seperti kredit modal kerja ini pihak bank berkepentingan terhadap kemampuan debitur untuk secepat mungkin memenuhi kewajiban finansialnya.

Pada setiap pemberian kredit khususnya kredit modal kerja, tidak semua kredit modal kerja yang diberikan akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Dalam setiap pemberian kredit ini akan mempunyai resiko, yaitu antara lain timbulnya kesulitan yang dialami debitur dalam membayar bunga maupun pengembalian pinjaman seperti yang tercantum di dalam perjanjian atau yang lebih dikenal dengan sebutan kredit macet. Oleh karena itu, untuk dapat mengurangi terjadinya kegagalan kredit maupun kredit macet maka diperlukan adanya pengendalian intern yang memadai.

Mengingat pentingnya pengendalian intern perkreditan terhadap pengamanan pemberian kredit modal kerja, maka penulis tertarik untuk membahas **“Peranan Pengendalian Intern Perkreditan Terhadap Pengamanan Pemberian Kredit Modal Kerja”**. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana

Bank Jabar Cabang Rangkasbitung dalam melaksanakan pengendalian intern terhadap pelaksanaan pemberian kredit modal kerja.

Penulis melakukan penelitian pada Bank Jabar pada Cabang Rangkasbitung yang berlokasi di jalan Patih Derus No. 04, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Bank Jabar Cabang Rangkasbitung didirikan pada tanggal 13 Agustus 1974 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan dengan No. KEP/948/DJM/111-3/1974. Pada hakikatnya Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat adalah suatu lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lebak yang melakukan usaha perbankan dan beroperasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak. Adapun aktivitas dari Bank Jabar Cabang Rangkasbitung adalah terdiri dari usaha penghimpunan dana, penggunaan dana, usaha jasa dan layanan tertentu lainnya yaitu sebagai bank devisa.

Struktur organisasi Bank Jabar Cabang Rangkasbitung mempunyai bentuk dan susunan yang jelas. Dalam struktur organisasi Bank Jabar Cabang Rangkasbitung terdapat adanya program kebijaksanaan secara umum dan pimpinan merupakan puncak di dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Untuk menjalankan tugasnya pimpinan dibantu oleh para karyawannya sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya masing-masing bagian atas dasar kerjasama untuk mencapai tujuan perusahaan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, yaitu membandingkan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di perusahaan yang berkaitan dengan peranan pengendalian intern perkreditan terhadap pengamanan pemberian kredit modal kerja. Data yang diperlukan dari perusahaan dikumpulkan

melalui wawancara, observasi dan daftar pertanyaan, sedangkan teori-teori dikumpulkan dari studi perpustakaan.

Untuk melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberian kredit maka Bank Jabar Cabang Rangkasbitung telah menetapkan suatu prosedur pemberian kredit yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Adapun prosedur-prosedur tersebut adalah terdiri dari prosedur permohonan kredit, analisis kredit, keputusan kredit, perjanjian kredit dan agunan kredit, pengawasan kredit serta prosedur pelunasan kredit. Prosedur-prosedur tersebut cukup relatif sederhana dan jelas dan telah mencerminkan adanya pengendalian pada setiap prosedur yang terlihat dari adanya pemisahan fungsi yang jelas pada setiap bagian, sehingga tertutup kemungkinan petugas bank untuk menangani kegiatan kredit dari awal sampai akhir, sehingga dengan demikian diperolehnya pertanggungjawaban yang jelas. Maka dari hal tersebut terlihat bahwa pelaksanaan pemberian kredit pada Bank Jabar telah mengandung pengendalian intern yang cukup memadai.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terlihat bahwa pimpinan cabang beserta personilnya telah berusaha menyelenggarakan struktur pengendalian intern dengan menerapkan pengendalian intern atas seluruh aktivitas pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung. Selain itu juga, telah terdapatnya suatu pembagian kerja yang jelas antara masing-masing bagian. Dengan demikian tanggungjawab dan wewenang setiap karyawan jelas dan tentunya akan memudahkan dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Jadi apabila terdapat suatu penyimpangan, maka tindakan koreksi yang harus diambil mejadi lebih mudah.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi bagian kredit Bank Jabar Cabang Rangkasbitung telah mengandung unsur-unsur pengendalian intern perkreditan yang dapat dilihat dari adanya pemisahan fungsi yang jelas. Selain itu, terlihat bahwa dalam prosedur analisis kredit telah menerapkan praktek-praktek yang sehat serta terdapatnya dokumen-dokumen yang cukup memadai seperti formulir-formulir serta buku pedoman perkreditan yang berlaku.

Pengendalian intern dalam pengawasan kredit terlihat dalam tindakan pengawasan yang dilakukan kepada debitur meliputi tindakan sebelum dan sesudah kredit diberikan. Adapun tindakan yang dilakukan oleh Bank Jabar Cabang Rangkasbitung sesudah kredit diberikan adalah tindakan pengawasan terhadap penggunaan kredit tersebut.

Adapun tujuan dari pengawasan kredit adalah untuk pembinaan, yaitu mengikuti pelaksanaan kredit dengan tujuan membina debitur, mendorong perkembangan usaha debitur dan meningkatkan kolektibilitas debitur yang kurang baik sehingga terhindar dari kredit macet. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, pengawasan kredit yang dilakukan oleh Bank Jabar Cabang Rangkasbitung telah cukup memadai tetapi masih terdapat kelemahan yaitu peninjauan dan pemeriksaan terhadap usaha debitur hanya dilakukan setiap tiga bulan sekali. Mengingat kredit merupakan harta perusahaan yang beresiko tinggi mengalami kerugian maka tindakan pengawasan memegang peranan yang sangat penting untuk memberikan jaminan yang memadai terhadap pengamanan kegiatan pemberian kredit.

Atas dasar pembahasan terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya suatu struktur pengendalian intern yang memadai sebagai alat bantu di dalam pemberian kredit modal kerja sehingga dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Jadi dengan demikian jelaslah hipotesis yang diajukan oleh penulis dapat diterima, yaitu: **“Dengan Diterapkannya Struktur Pengendalian Intern yang Memadai Pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung Dapat Mengamankan Pelaksanaan Pemberian Kredit Modal Kerja.”**

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, tentang Peranan Pengendalian Intern Perkreditan Terhadap Pengamanan Pemberian Kredit Modal Kerja, maka penulis akan mencoba membuat beberapa simpulan, dan selanjutnya penulis akan mencoba membuat saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi Bank Jabar Cabang Rangkasbitung.

6.1. Simpulan

6.1.1. Simpulan Umum

- 1) Obyek penelitian dalam skripsi ini adalah Bank Jawa Barat Cabang Rangkasbitung, yang merupakan perusahaan daerah yang bergerak dalam bidang perbankan. Bank Jabar Cabang Rangkasbitung sebagai kreditur memiliki prosedur tertentu dalam memproses permohonan kredit dari pihak calon debitur. Dalam prosedur permohonan kredit tersebut telah mencerminkan adanya pengendalian intern yang cukup memadai. Hal ini terlihat bahwa dalam formulir permohonan kredit telah cukup baik, selain itu telah terdapatnya pemisahan fungsi yang jelas pada setiap fungsi yaitu fungsi otorisasi, fungsi pelaksanaan, fungsi pencatatan dan fungsi pengawasan.
- 2) Wewenang untuk memutuskan layak atau tidaknya dalam memberikan kredit adalah dilakukan oleh Pimpinan Cabang dan untuk

memperlancar dalam memutuskan kredit maka Pimpinan Cabang mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Kasi Kredit untuk jumlah tertentu. Untuk permohonan kredit yang tidak dapat diputuskan oleh cabang maka diajukan ke Kantor Pusat atau dibahas dalam Komite Kredit. Pemberian keputusan kredit kepada debitur telah cukup obyektif yaitu pada prinsipnya setiap keputusan pemberian kredit tidak dapat diputuskan oleh satu orang, melainkan harus merupakan keputusan bersama Komite Kredit. Dengan demikian, maka pengendalian intern dalam memutuskan kredit telah cukup baik.

- 3) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan Bank Jabar Cabang Rangkasbitung dalam pengambilan keputusan kredit adalah latar belakang calon debitur, tujuan penggunaan kredit, operasi usaha calon debitur, keuntungan bagi pihak bank, jaminan, laporan keuangan calon debitur dan kondisi sosial ekonomi. Pada setiap keputusan pemberian kredit selalu didasarkan pada kelayakan proyek dan usaha debitur dengan mempertimbangkan keamanan kredit.

6.1.2. Simpulan Khusus

- 1) Pelaksanaan pemberian kredit modal kerja pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung telah menerapkan struktur pengendalian intern yang memadai. Hal ini dapat terlihat bahwa di dalam prosedur pemberian kredit telah disusun secara sistematis dan telah terdapatnya pemisahan fungsi yang jelas, adanya sistem pemberian wewenang yang jelas,

sistem pencatatan yang telah cukup memadai, dan sistem pelaporan perkreditan yang telah cukup baik. Dalam prosedur analisis kredit terdapat suatu praktek yang cukup sehat yang dilakukan oleh pihak bank dengan melakukan suatu penilaian terlebih dahulu terhadap kredit yang akan diberikan. Selain itu dalam prosedur pengawasan kredit telah dilakukan secara preventif oleh petugas bank, tetapi dalam pengawasan kredit ini masih terdapat kelemahan, yaitu dalam peninjauan atau pemeriksaan terhadap debitur hanya dilakukan setiap tiga bulan sekali.

- 2) Peranan pengendalian intern perkreditan pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung telah cukup memadai. Hal ini dapat terlihat bahwa di dalam pelaksanaan pemberian kredit modal kerja pada Bank Jabar telah mengandung unsur-unsur pengendalian intern perkreditan yang memadai yaitu tercermin dari adanya pemisahan fungsi yang jelas, praktek yang sehat, dokumen yang cukup memadai, dan adanya bagian pengawasan kredit.

6.2. Saran

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam hasil penelitian serta simpulan, maka saran yang dapat penulis berikan pada Bank Jabar Cabang Rangkasbitung adalah sebagai berikut :

- 1) Mengingat kredit merupakan kekayaan bank yang beresiko tinggi mengalami kerugian maka pada prosedur pengawasan kredit, pihak bank sebaiknya

sedini mungkin sering melakukan peninjauan dan pemeriksaan secara mendadak terhadap kegiatan usaha debitur, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kredit yang telah diberikan digunakan sesuai dengan rencana dan mencegah terjadinya kredit macet.

- 2) Untuk menghindari terjadinya hubungan yang sangat erat dengan para debitur dan mungkin timbulnya persekongkolan, maka sebaiknya secara rutin dilakukan mutasi para pegawai dan pejabat bank yang berhubungan dengan kegiatan pemberian kredit, selain itu juga untuk menghindari terjadinya kejenuhan dari para pegawai terhadap tugas-tugasnya.
- 3) Untuk melakukan pengendalian intern terhadap prosedur analisis kredit pihak bank diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan para analis kredit baik melalui pendidikan intern maupun ekstern Bank. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dan memperkecil resiko kesalahan dalam menganalisis kredit, sehingga dengan demikian keamanan kredit dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Amin Widjaja Tunggal. **Struktur Pengendalian Intern**, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, Edisi Pertama, 1995.
2. Arrens, Loebbecke. *Auditing : An Integral Approach*, London : Prentice Hall International Editions, 6 Editions, 1994
3. Astiko, Sunardi. **Pengantar Manajemen Perkreditan**, Yogyakarta : Penerbit Andi, Edisi Pertama, 1996.
4. Bambang Hartadi. **Sistem Pengendalian Intern**, Yogyakarta : Penerbit BPFE. Edisi Kedua, 1997.
5. Bambang Riyanto. **Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan**, Yogyakarta : Badan Penerbit Gajah Mada . Edisi Ketiga, 1994.
6. Bodnar H. George, William S. Hopwood. *Accounting And Information System*, London : Prentice Hall International Editions, 1995.
7. Dahlan Siamat. **Manajemen Bank Umum**, Jakarta : Penerbit Intermedia. Edisi Pertama, 1993.
8. Gatot Supramono. **Perbankan dan Masalah Kredit**, Jakarta : Penerbit Djambatan. Edisi Revisi, 1996
9. H. Hadiwidjaja & R. A. Rivai Wirasasmita. **Analisis Kredit**, Bandung ; Penerbit Pionir Jaya, 1990.
10. Kasmir. **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
11. La Midjan, Azha Susanto. **Sistem Informasi Akuntansi**, Penerbit : Lembaga Informatika Akuntansi. Edisi Kedelapan, 1994.
12. Malayu S.P. Hasibuan. **Manajemen Perbankan**, Jakarta : Penerbit : PT Toko Gunung Agung, 1997.
13. M. Samsul & Mustofa. **Sistem Akuntansi Pendekatan Manajerial**, Yogyakarta : Penerbit Liberty. Edisi Kedua, 1992.
14. Muchdarsyah Sinungan. **Manajemen Dana Bank**, Jakarta : Penerbit PT Bina Aksara. Edisi Kedua, 1999.

15. Mulyadi. **Pemeriksaan Akuntan**, Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi YKPN. Edisi Pertama, 1992.
16. Mulyadi. **Sistem Akuntansi**, Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu YKPN. Edisi Ketiga, 1997.
17. S. Munawir. **Analisa Laporan Keuangan**, Yogyakarta : Penerbit Liberty, Edisi Keempat, 1993.
18. Teguh Pudjo Muljono. **Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil**, Yogyakarta : Penerbit BPFE. Edisi Ketiga, 1993.
19. Thomas Suyatno, H.A. Chalik, Made Sukada, Tinon Yuniati, Djuhaepah T. Marala. **Dasar-Dasar Perkreditan**, Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama. Edisi Keempat, 1999.
20. Zaki Baridwan. **Sistem Informasi Akuntansi**, Yogyakarta : Penerbit BPFE. Edisi Kedua, 1993.



BANK JABAR

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT

Rangkasbitung, 10 Oktober 2001

Nomor : 115/Rks-Psu/2001
Lamp. : -
Perihal : Keterangan Riset

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Pakuan
Jl. Pakuan PO BOX 452
B O G O R

Bersama ini kami beritahukan bahwa yang tercantum di bawah ini :

Nama : Leni Suparlaeni
N I M : 022197238
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Alamat Rumah : Jl. Pakuan No. 13 Bogor

Telah menyelesaikan riset pada kantor kami PT. Bank Jabar Cabang Rangkasbitung dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " Peranan Struktur Pengendalian Intern Perkreditan Terhadap Pengamanan Pemberian Kredit Modal Kerja "

Selanjutnya kami harapkan bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat menyerahkan skripsi yang telah dibukukan/disyahkan kepada kami.

BANK JABAR

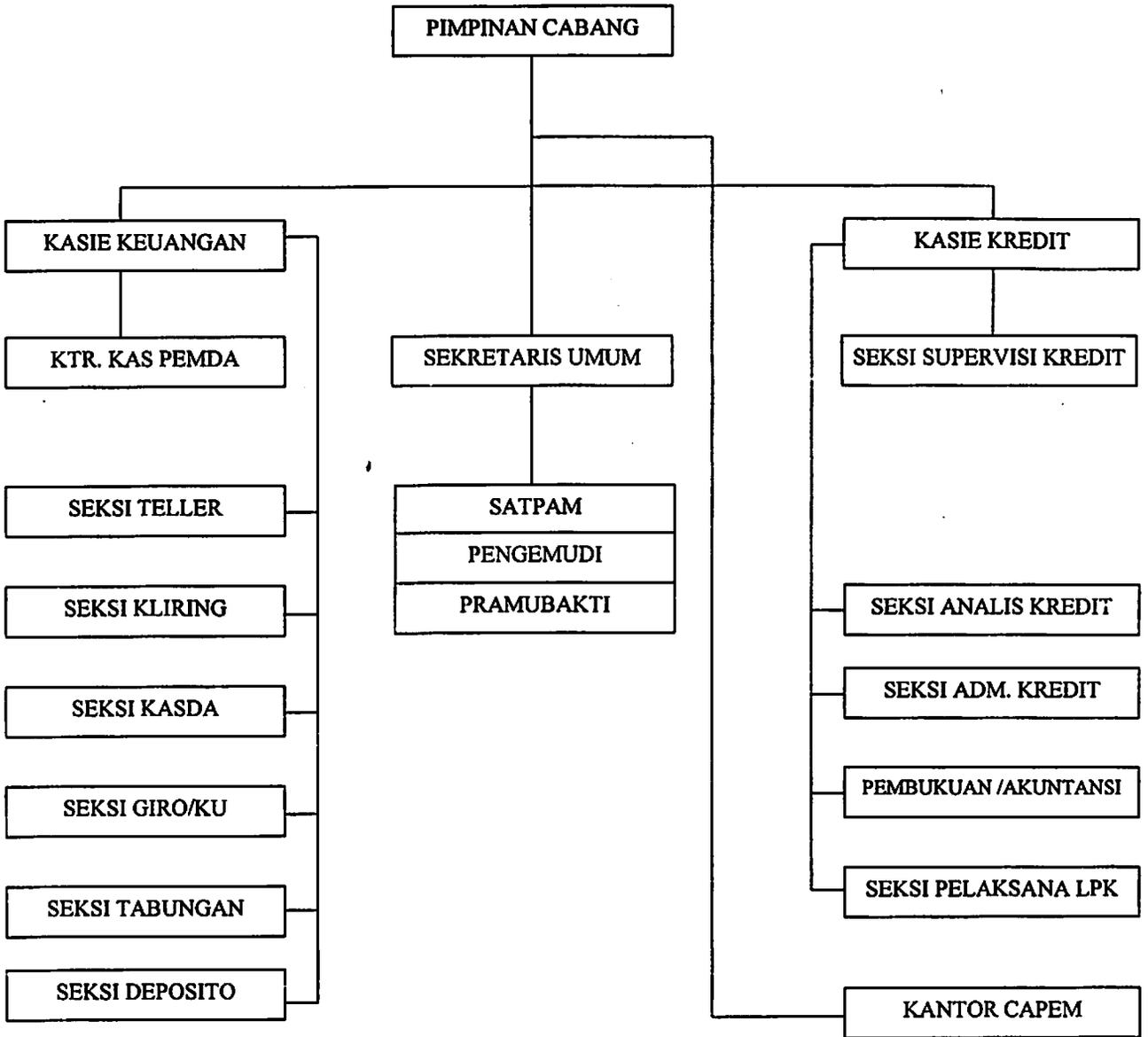
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
CABANG RANGKASBITUNG



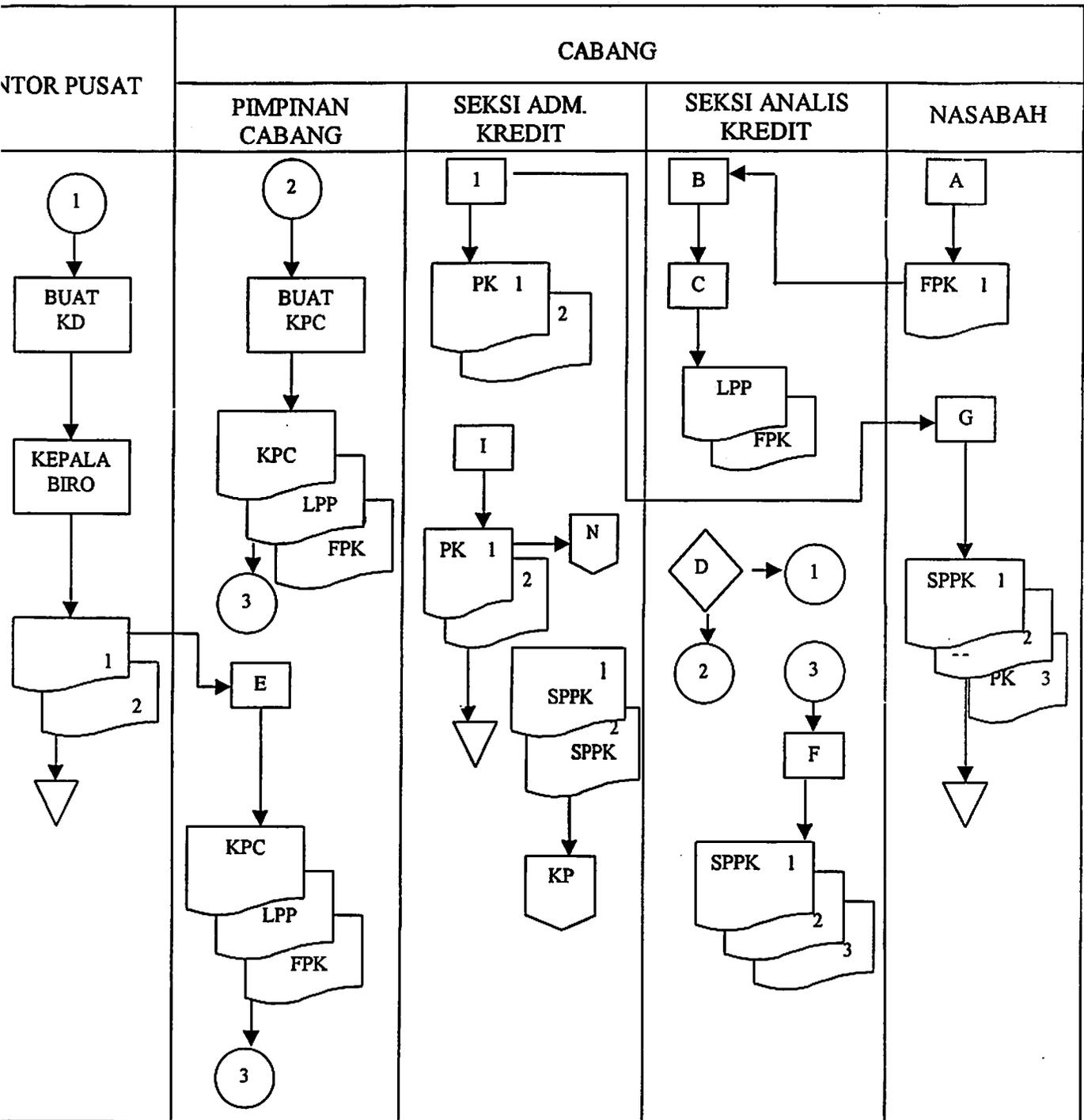
BANK JABAR
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT
CABANG RANGKASBITUNG


SUJANA - DIDA HERDIYANA

**STRUKTUR ORGANISASI BANK JABAR
CABANG RANGKASBITUNG**



FLOW CHART PEMBERIAN KREDIT

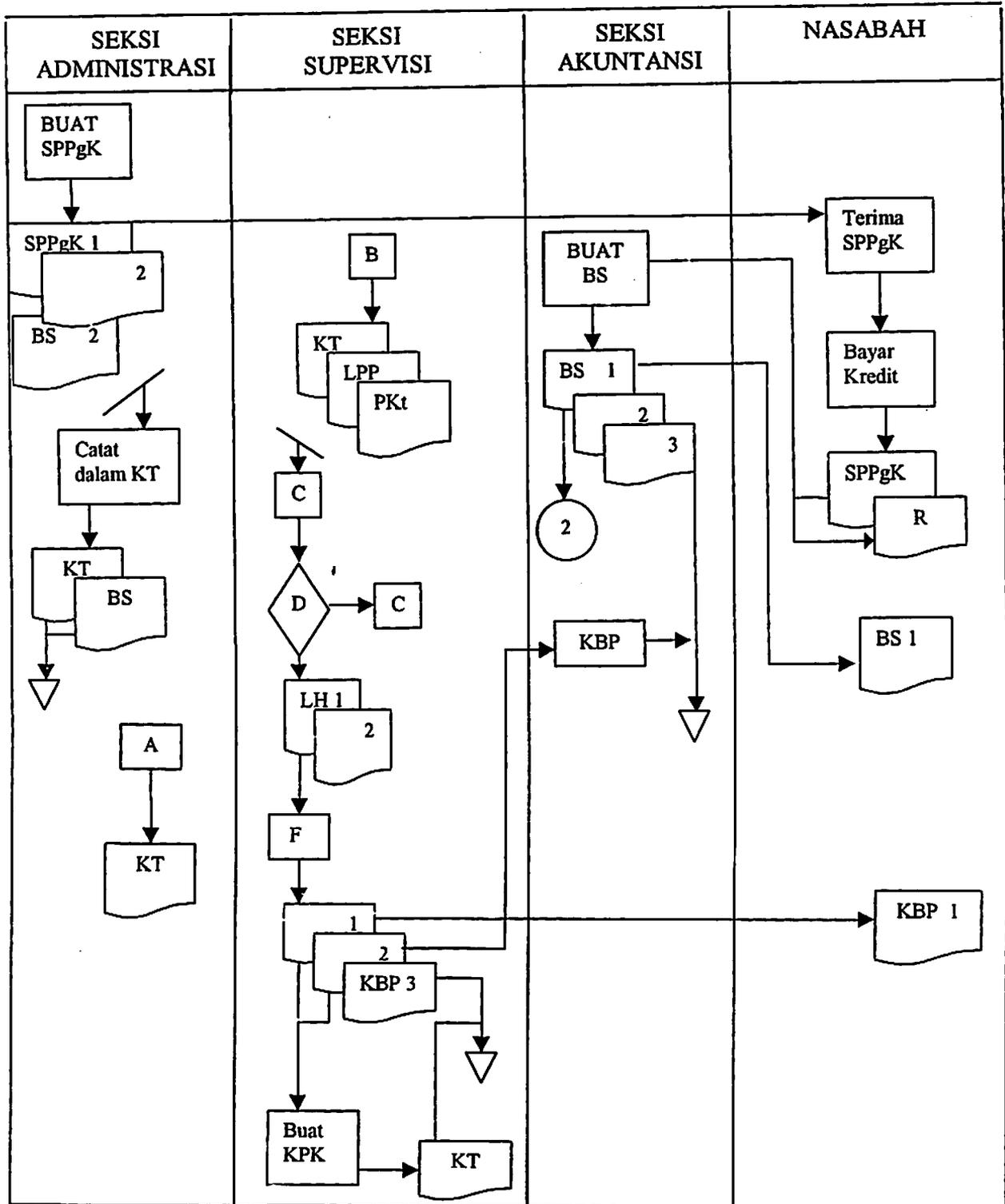


Penjelasan :

- PK = Formulir Permohonan Kredit
- SPPK = Surat Persetujuan Kredit
- LPP = Laporan Penilaian Proyek
- D = Keputusan Direksi
- KPC = Keputusan Pimpinan Cabang
- Perjanjian Kredit
- Kantor Pusat
- Nasabah

- A = Mengisi FPK
- B = Teliti kelengkapan FPK, & minta persetujuan
- C = Lakukan analisis & LPP
- D = Minta persetujuan dari Pejabat berwenang
- E = Pemberitahuan kepada Cabang
- F = Buat SPPK
- G = Terima SPPK, ditandatangani dan dikembalikan ke Cabang
- H = Buat PK
- I = Ditandatangani oleh Pimpinan Cabang & nasabah

FLOW CHART PENAGIHAN KREDIT



= Surat Pemberitahuan Penagihan Kredit

- = Uang atau buku rekening
- = Bukti Setoran
- = Kartu Teknis
- = Laporan Hasil Inspeksi
- = Kwitansi Bukti Pembayaran
- = Kartu Pengawasan Kredit

- A = Bila macet, teliti berkas nasabah dan serahkan pada Supervisi Kredit
- B = Terima KT dan minta LPP
- C = Melakukan penelitian atas barang jaminan
- D = Jaminan sesuai kriteria atau tidak
- E = Laporan pada Pimpinan Cabang atau Direksi
- F = Lakukan penagihan ke nasabah, buat KBP